

Skenario Politik Luar Negeri Indonesia 2045



LPPSP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL DAN POLITIK



CIReS

Skenario Politik Luar Negeri Indonesia 2045

Penulis

Ardhitya Eduard Yeremia, Mutti Anggitta, Darang Sahdana Candra, Aisha Rasyidilla Kusumasomantri, dan Dizar Sabana

Asisten Penulis

Akia Kevin Muliansyah Athallah dan Inara Pangastuti

Penyelaras Akhir dan Tata Letak

Mutti Anggitta dan Rinaldy

**Laboratorium Indonesia 2045
2021**

Skenario Politik Luar Negeri Indonesia 2045

© **Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Center for International Relations Studies (CIReS)-LPPSP FISIP Universitas Indonesia, 2021**

Cetakan Pertama, November 2021.

E-ISBN: 978-623-99095-0-5

Tim Peneliti

Ardhitya Eduard Yeremia

Mutti Anggitta

Darang Sahdana Candra

Aisha Rasyidilla Kusumasomantri

Dizar Sabana

Asisten Peneliti

Akia Kevin Muliansyah Athallah

Inara Pangastuti

Penyelaras Akhir

Mutti Anggitta

Desain Sampul & Tata Letak

Rinaldy

Untuk mengutip:

Yeremia, Ardhitya Eduard, et al. 2021. "Skenario Politik Luar Negeri Indonesia 2045". *LAB 45 Research Report*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 dan CIReS-LPPSP FISIP UI adalah pemegang tunggal hak cipta atas kajian akademik ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45 dan CIReS-LPPSP FISIP UI. Silakan menggangdakan sebagian atau seluruh isi kajian akademik ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabes Hankam No. T65

Bambu Apus, Cilangkap

DKI Jakarta 13890

+62811452045

lab45@lab45.id

CIReS-LPPSP FISIP

Universitas Indonesia

Gedung Nusantara 2 Lantai 2

FISIP Universitas Indonesia,

Depok 16424

+62 819 9001 1681

internationalrelations@ui.ac.id

Kata Pengantar

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) bekerja sama dengan Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP FISIP Universitas Indonesia melakukan sejumlah penelitian mengenai proyeksi strategis hingga 2045. Topik-topik yang dikaji meliputi perkembangan hubungan Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, arah politik luar negeri Indonesia, dan kesetaraan gender di Indonesia. Laporan bertajuk Skenario Politik Luar Negeri Indonesia 2045 merupakan salah satu produk analisis dari kajian-kajian ilmiah tersebut.

Dalam penelitian ini, tim peneliti mengkaji variabel-variabel di lingkungan internasional dan domestik, yang membentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan hasil telaah lebih lanjut dari temuan-temuan yang didapatkan, tim peneliti kemudian membangun beberapa skenario terkait apa yang akan dihadapi oleh Indonesia pada 2045 dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Dua skenario ideal kemudian diajukan untuk diantisipasi lebih lanjut, mengingat pentingnya meningkatkan komitmen pada demokrasi dan pembangunan kapabilitas negara.

Kajian LAB 45 ini diharapkan dapat memacu hadirnya kajian-kajian serupa. Metodologi perencanaan dan pembangunan skenario diharapkan dapat menyajikan opsi-opsi strategis tentang berbagai kemungkinan atau perkembangan yang harus diantisipasi oleh para pemangku kebijakan di bidang masing-masing. Sebagai bagian komunitas epistemik, LAB 45 berharap produk analisis ini juga mendorong kolaborasi yang lebih intensif antara akademisi dan praktisi, terutama untuk mengatasi permasalahan struktural yang membutuhkan solusi pendekatan jangka panjang.

Jakarta, 17 November 2021

Andi Widjajanto

Koordinator LAB 45

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Singkatan dan Akronim.....	iv
Daftar Bagan.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Pendahuluan	1
Metodologi	3
Mengkaji Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Antara Faktor Sistemis dan Domestik.....	4
Pilar-pilar Kebijakan Luar Negeri Indonesia	10
Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Angka	17
Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2045	32
Skenario <i>Hedging</i> Lemah dan Tidak Aktif	35
Skenario Aktif, tetapi Berpihak.....	36
Skenario Otonomi Strategis Indonesia di Dunia Internasional	36
Skenario Isolasionis	37
Skenario Non-Blok dan Aktif.....	38
Skenario <i>Hedging</i> sebagai Strategi Utama Politik Luar Negeri.....	40
Skenario <i>Hedging</i> sebagai Strategi Keberlangsungan Hidup Indonesia.....	41
Kesimpulan dan Rekomendasi	42

Daftar Singkatan dan Akronim

AOIP	ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
APSC	ASEAN Political-Security Community
ARF	ASEAN Regional Forum
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ATCAF	ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework
AUKUS	Australia, UK and US
CGI	Consultative Group on Indonesia
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EAS	East Asia Summit
FDI	Foreign Direct Investment
G7	Group of Seven
G20	Group of Twenty
GNB	Gerakan Non-Blok
HAM	Hak Asasi Manusia
IGGI	Intergovernmental Group on Indonesia
Jokowi	Joko Widodo
KAAs	Konferensi Asia-Afrika
KSST	Kerja sama Selatan-Selatan Triangular
KTNB	Kerja sama Teknik Negara Berkembang
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
NEFO	New Emerging Forces
OLDEFO	Old Established Forces
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
QUAD	The Quadrilateral Security Dialogue
SEANFWZ	Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone
TAC	Treaty of Amity and Cooperation
UNPKO	United Nations Peacekeeping Operation
UUD	Undang-Undang Dasar
V-Dem	Varieties of Democracy
ZOPFAN	Zone of Peace, Freedom and Neutrality

Daftar Bagan

Bagan 1. Perkembangan Peringkat Jumlah Personel Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB, 1990 - 2021	19
Bagan 2. Perkembangan Jumlah Personel Keseluruhan Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB, 1990 - 2021	20
Bagan 3. Perbandingan Jumlah Traktat yang Ditandatangani Indonesia berdasarkan Jenisnya	21
Bagan 4. Perkembangan Jumlah Traktat yang Ditandatangani Indonesia, 1947 - 2021	22
Bagan 5. Perkembangan Jumlah Traktat yang Ditandatangani Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, 1961 - 2021	23
Bagan 6. Perkembangan Jumlah Resolusi dengan Partisipasi Indonesia di Majelis Umum PBB Tahun 1952 - 2021	25
Bagan 7. Jumlah dan Persentase Resolusi Indonesia di Majelis Umum PBB.....	26

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Misi Perdamaian yang diikuti oleh Indonesia	18
Tabel 2. Negara-negara Mitra Indonesia dalam Resolusi di Majelis Umum PBB.....	24
Tabel 3. Regresi dengan Total Resolusi Majelis Umum PBB yang didukung Indonesia sebagai variabel dependen	27
Tabel 4. Regresi Dengan Jumlah Traktat Internasional Indonesia sebagai Variabel Dependen	28
Tabel 5. Regresi Bivariat Dengan Lag 1 Tahun dan Lag 2 Tahun Antara Jumlah Traktat Internasional Indonesia dengan Log PDB Indonesia	29
Tabel 6. Regresi dengan Jumlah Pasukan UNPKO Indonesia sebagai Variabel Dependen....	30
Tabel 7. Regresi Bivariat dengan Lag 1 Tahun Dan Lag 2 Tahun antara Jumlah Pasukan UNPKO Indonesia dengan Log PDB Indonesia.....	30
Tabel 8. Regresi antara Skor-Skor Indeks Demokrasi dengan Log PDB Indonesia	31
Tabel 9. Potensi Skenario Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2045	34

Ringkasan Eksekutif

Berkat kesuksesan melewati masa transisi demokrasi dan komitmen untuk mengembangkan ekonomi, kapasitas Indonesia untuk memainkan peran aktif di dunia internasional terus meningkat. Namun, di tengah kebangkitan perannya, dinamika sistem internasional masih terus diwarnai ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan membuat perhitungan yang dapat dijadikan dasar untuk merencanakan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa secara umum Indonesia terus mencatatkan peningkatan keaktifan pelaksanaan kebijakan luar negeri, sebagaimana yang ditunjukkan pada jumlah perjanjian internasional yang ditandatangani dan jumlah pasukan perdamaian yang dikirimkan. Pelaksanaan kebijakan luar negeri yang aktif tersebut secara signifikan berkorelasi positif dengan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini menyarankan bahwa peningkatan kapabilitas ekonomi Indonesia di masa depan akan diikuti oleh pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin aktif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan PDB Indonesia memiliki kaitan dengan peningkatan komitmen Indonesia terhadap perwujudan demokrasi partisipatoris, yang memungkinkan terjadinya perebutan kekuasaan secara kompetitif. Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia pada 2045 sangat perlu mempertahankan komitmen terhadap demokrasi dan pembangunan ekonomi nasional, demi manifestasi Indonesia yang semakin aktif dan mengambil peran kepemimpinan dalam urusan-urusan internasional.

Dari sudut pandang teori realisme neoklasik, penelitian ini kemudian memanfaatkan temuan-temuan tersebut untuk membangun skenario-skenario terkait pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia 2045. Dari delapan skenario yang dibangun, terdapat dua skenario yang paling ideal bagi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya di masa depan. Skenario yang pertama terjadi ketika hubungan antara negara-negara besar mewujud dalam nuansa persaingan strategis yang tidak kompetitif, sedangkan skenario yang kedua terjadi ketika hubungan antar negara-negara besar mewujud dalam nuansa persaingan strategis yang sangat kompetitif. Menghadapi kedua skenario tersebut, pelaksanaan kebijakan luar negeri pada dasarnya sama-sama perlu diarahkan untuk memperluas ruang bagi Indonesia untuk bermanuver. Akan tetapi, perbedaan terdapat pada pilihan strategi. Pada skenario pertama, usaha untuk meningkatkan posisi tawar bagi Indonesia pasca 2045 dilakukan dengan meningkatkan lingkup pengaruh (*sphere of influence*). Pada skenario kedua, usaha meningkatkan posisi tawar Indonesia pasca-2045 dilakukan dengan cara meningkatkan

kapabilitas. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa komitmen tinggi menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan negara-negara besar dapat didedikasikan seutuhnya bagi usaha memperkuat kapabilitas negara.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya bagi Indonesia di masa depan untuk mempertahankan komitmen pada prinsip bebas-aktif. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan luar negeri yang sedemikian harus pula dibarengi dengan komitmen untuk terus mengembangkan kapabilitas negara demi menjamin tersedianya ruang bermanuver yang lebih luas bagi Indonesia dalam berhadapan dengan negara-negara besar. Dengan cara inilah, Indonesia akan terus berkontribusi bagi dunia sambil menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam negeri.

Pendahuluan

Banyak sarjana, ahli, dan pengamat berpendapat bahwa memasuki dekade kedua di abad XXI, Indonesia sedang bangkit untuk kembali memainkan peran penting dalam urusan-urusan internasional.¹ Beberapa perkembangan-perkembangan di dalam negeri telah berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. Pertama, kesuksesan melewati masa transisi demokrasi telah mengantar Indonesia pada tahapan konsolidasi demokrasi tanpa gejolak politik yang berarti. Kedua, capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan di tengah memburuknya situasi perekonomian dunia pascakrisis ekonomi global 2008-2009. Dengan demikian, stabilitas politik dalam negeri yang disertai dengan kemampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi telah membuat Indonesia mampu mengambil inisiatif-inisiatif baru dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya.

Salah satu yang menandai kebangkitan menuju peran Indonesia dalam panggung dunia adalah keanggotaannya dalam kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yaitu The Group of Twenty (G20). Indonesia adalah satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara dan akan menjabat sebagai presiden dari kelompok itu mulai Desember 2021. Selain itu, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus mempertahankan komitmennya terhadap Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Setelah mengawali terbentuknya ASEAN Political-Security Community (APSC), Indonesia baru-baru ini menjadi inisiator di balik terbitnya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).² Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya dengan kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) dan anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM). Kontribusi terhadap usaha mewujudkan perdamaian dunia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar dalam pengiriman Pasukan Perdamaian PBB.³ Akhir-akhir ini, masyarakat internasional kembali memberikan perhatian kepada Indonesia setelah pemerintahan Joko Widodo dianggap berhasil menangani Pandemi COVID-19.

¹ Evan A. Laksmana, "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?" *Contemporary Southeast Asia* 33 no. 2 (Singapore: ISEAS, 2011): 157-82; Anthony J.S. Reid, *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant* (Singapore: ISEAS, 2012); Amitav Acharya, *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*, *World Scientific* (Singapore: 2014); Evi Fitriani, "Yudhoyono's foreign policy: is Indonesia a rising power?" dalam ed. E. Aspinall, M. Mietzner, D. Tomsa, *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation* (Singapore: ISEAS, 2015); Mohamad Rosyidin, "Foreign Policy in Changing Global Politics: Indonesia's Foreign Policy and the Quest for Major Power Status in the Asian Century", *South East Asia Research* 25, no. 2 (2017); Moch Faisal Karim, "Middle Power, Status-seeking and Role Conceptions: the Cases of Indonesia and South Korea", *Australian Journal of International Affairs* 72, no. 4 (2018): 343-63; Mohamad Rosyidin, "The Moment of a Rising Power: Indonesia's Foreign Policy Activism 2004-2014," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 4 no.1 (2021): 1-25.

² Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific," *International Affairs* 96 no. 1 (2020): 111-129.

³ Kementerian Luar Negeri RI. *Indonesia dan Rekam Jejak di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*, Kementerian Luar Negeri RI (2021).

Melalui peran dan keaktifannya dalam urusan-urusan internasional, Indonesia dapat dikatakan tengah berperilaku sebagai kekuatan menengah (*middle power*). Dari kacamata pendekatan behavioralisme, Indonesia berperan sebagai warga masyarakat internasional yang baik dengan mendukung tatanan internasional dan multilateralisme, serta menjadi perantara dalam perselisihan.⁴ Selain itu, Indonesia terus berusaha menjaga independensi terhadap negara-negara besar dalam merespons dinamika politik internasional.⁵ Kedua hal ini tampak selaras dengan prinsip bebas-aktif, yang mengilhami pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Sebagai akibatnya, sembari menunjukkan posisinya sebagai negara berkekuatan menengah, Indonesia dapat terus menyeimbangkan kedekatannya dengan negara-negara besar dalam rangka melayani kepentingan nasionalnya.

Di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia atas dasar pragmatisme berkomitmen untuk terus mengembangkan hubungannya dengan kedua negara besar, sambil terus konsisten menyatakan keengganannya untuk memilih antara Washington dan Beijing. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Tiongkok telah masuk ke dalam daftar tiga besar negara sumber investasi asing bersama Singapura dan Jepang.⁶ Usaha-usaha tersebut tidak menutup usaha Indonesia untuk menjajaki kemungkinan peningkatan perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat.⁷ Dalam hal pengadaan vaksin pun, Indonesia terus berusaha melakukan diversifikasi sumber vaksin untuk menghindari ketergantungan berlebihan terhadap Tiongkok sebagai sumber suplai utama bagi Indonesia. Independensi Indonesia terhadap Tiongkok juga relatif dapat dipertahankan, yang tampak dalam sikap dan tindakan Jakarta dalam merespons semakin asertifnya Beijing dalam dinamika sengketa di Laut Tiongkok Selatan.⁸ Sebagai akibatnya, Indonesia masih memiliki ruang bermanuver yang cukup luas di tengah ketidakpastian hasil akhir persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam menghadapi ketidakpastian dalam dinamika sistem internasional, komitmen terhadap prinsip bebas-aktif dengan pragmatisme sebagai dasar, harus pula tampak dalam usaha melakukan perhitungan-perhitungan sebelum mengambil tindakan. Perhitungan-

⁴ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Powers and the Behavioural Model," *Global Society* 32, no. 1 (2018): 56.

⁵ Robert W. Cox, "Middlepowermanship, Japan, and Future World Order," *International Journal* 44, no. 4 (1989): 826.

⁶ Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Periode 2014-2020, "Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (2021). Diakses 14 November 2021. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

⁷ "Secretary Blinken's Call with Indonesian Foreign Minister Marsudi," Office of the Spokesperson U.S. Department of State (2021). Diakses 14 November 2021. <https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-indonesian-foreign-minister-marsudi/#:~:text=Secretary%20of%20State%20Antony%20J,range%20of%20our%20bilateral%20ties>.

⁸ Ardhyta Eduard Yeremia & Klaus Heinrich Raditio, "Indonesia-China Vaccine Cooperation and South China Sea Diplomacy," *ISEAS Articles & Commentary* 55 (2021).

perhitungan tersebut dapat kemudian ditindaklanjuti ke dalam suatu pembangunan skenario-skenario terkait langkah-langkah yang perlu di ambil di masa depan. Hal-hal seperti ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa respons-respons Indonesia dengan postur kebijakan luar negeri yang semakin aktif, dapat sebagian besar (kalau tidak bisa seutuhnya) didedikasikan bagi kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mewujudkan aspirasi Mohamad Hatta (Bapak Politik Luar Negeri Indonesia) terkait keharusan Indonesia untuk "tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap[-nya] sendiri, berhak memperjuangkan tujuan[-nya] sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seutuhnya."⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan: "skenario-skenario seperti apa yang kemungkinan dihadapi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya pada 2045?" Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini hendak mencapai lima tujuan utama. Pertama, menguraikan perkembangan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Kedua, memaparkan faktor-faktor yang membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Ketiga, menganalisis hubungan antara faktor-faktor utama yang membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Keempat, memformulasikan skenario-skenario yang mungkin akan dihadapi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya pada 2045. Terakhir, merumuskan strategi-strategi yang dapat digunakan Indonesia untuk menghadapi skenario-skenario tersebut dalam rangka melayani kepentingan nasional

Metodologi

Demi mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini mendekati realitas sosial-politik secara positivistik dengan menggunakan berbagai data, baik kuantitatif, maupun kualitatif. Pencarian data tersebut didahului oleh suatu studi kepustakaan, yang ditujukan untuk memetakan terlebih dahulu temuan-temuan utama dari kajian-kajian akademik terdahulu mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Temuan-temuan tersebut kemudian menuntun penelitian ini untuk memilih data yang akan ditelaah lebih lanjut.

Data kuantitatif dikumpulkan dari pangkalan-pangkalan data yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Luar Negeri, dan PBB. Data ini kemudian dianalisis secara statistik untuk kemudian dimaknai lebih jauh. Di lain pihak, data kualitatif dikumpulkan berdasarkan studi dokumen dari literatur-literatur utama

⁹ Iding Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato Dari Tahun 1942 s.d. 1949*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981).

mengenai kebijakan luar negeri dan kebijakan luar negeri Indonesia. Data-data kualitatif tersebut dipergunakan untuk memperkuat temuan-temuan analisis data kuantitatif.

Berdasarkan hasil uji statistik dan temuan studi dokumen, penelitian ini kemudian menyusun asumsi-asumsi dan dasar-dasar yang dipergunakan untuk membangun skenario-skenario atau pengaturan yang akan dihadapi Indonesia pada 2045 dalam rangka melaksanakan kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, kerangka teori realisme neoklasik dipergunakan untuk memperkuat asumsi dan dasar yang dipergunakan untuk membangun skenario-skenario tersebut. Kerangka teoretis tersebut dipergunakan untuk menjelaskan interaksi antarvariabel dalam menjelaskan pilihan perilaku negara, di mana lingkungan domestik akan memediasi dampak dari dinamika di lingkungan eksternal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan skenario-skenario yang dibangun tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan strategi-strategi yang harus digunakan pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia pada 2045.

Mengkaji Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Antara Faktor Sistemis dan Domestik

Pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia tidak pernah dapat dilepaskan dari dinamika-dinamika baik di lingkungan internasional, maupun domestik. Pola seperti ini tentu tidak menjadi keunikan Indonesia saja, sebagaimana telah ditunjukkan oleh banyak hasil telaah dalam sub-kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Ilmu Hubungan Internasional.¹⁰ Namun demikian, investigasi akademik tetap dibutuhkan demi mengidentifikasi bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tataran sistem internasional dan domestik secara spesifik memengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri tertentu di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, semakin menunjukkan minat untuk memainkan peran-peran internasional yang lebih besar baik di tingkat kawasan, maupun global.¹¹

Sejak awal kemerdekaan, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dipandu oleh prinsip bebas-aktif. Dalam tulisannya, Mohammad Hatta mendefinisikan “bebas” sebagai komitmen untuk tidak mengambil keberpihakan pada kelompok negara mana pun dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin.¹² Sementara itu, “aktif”

¹⁰ Valerie M. Hudson, “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations,” *Foreign Policy Analysis* (2005): 1-30.

¹¹ Anthony J.S. Reid, *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant* (Singapore: ISEAS, 2012); Moch Faisal Karim, “Middle Power, Status-seeking and Role Conceptions: the Cases of Indonesia and South Korea”, *Australian Journal of International Affairs* 72, no. 4 (2018): 343-63.

¹² Mohammad Hatta, “Indonesia's Foreign Policy”, *Foreign Affairs* 31, no. 3 (1953): 443-444.

melambangkan komitmen Indonesia untuk menjaga dan mengupayakan perdamaian dunia dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Perlu dicatat bahwa prinsip bebas-aktif merefleksikan aspirasi Hatta atas kemandirian Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia demi melayani kepentingan nasional, termasuk dalam memilih dengan negara mana saja hubungan dan kerja sama dapat dibangun.

Rumusan Hatta tentang prinsip bebas-aktif memberikan gambaran bahwa Indonesia memerhatikan variabel sistemis dalam perumusan kebijakan, terutama terkait persaingan negara besar (*great power rivalry*).¹³ Sejalan dengan tesis ini, tulisan Franklin B. Weinstein menyatakan bahwa Indonesia memandang politik internasional sebagai area penuh pertarungan dengan negara-negara besar sebagai ancaman.¹⁴ Tan See Seng juga beranggapan bahwa Indonesia melihat negara-negara besar sebagai aktor yang mendominasi politik internasional dan berperilaku sesuai kepentingan mereka sendiri.¹⁵ Daniel Novotny kemudian mengonsolidasikan tesis ini dengan berargumen bahwa sejatinya, para perumus kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa berusaha menjaga kesetimbangan antara negara-negara besar karena dinilai dapat memberinya ruang aman untuk bermanuver dalam politik internasional.¹⁶

Dapat dikatakan bahwa dalam mencanangkan bebas-aktif, Hatta sedang berbicara tidak hanya kepada khalayak internasional, melainkan juga khalayak domestik. Ia merespons situasi lingkungan internasional yang secara dominan dibentuk oleh persaingan strategis (*strategic rivalry*) dari dua negara adikuasa dengan menekan pendirian Indonesia untuk tidak berpihak kepada salah satunya. Di lain sisi, ketidakberpihakan Indonesia tersebut juga ditujukan untuk merespons situasi di mana pertarungan ideologi di tingkat global juga mewujud di dalam negeri. Hal ini tampak dari dinamika perebutan kekuasaan (*struggle for power*) antara elite-elite politik yang berhaluan ideologi politik kiri dengan mereka yang lebih bersimpati pada Blok Barat pimpinan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Hatta mengartikulasikan “bebas-aktif” untuk pertama kali justru dalam pidatonya di sebuah panggung domestik, yakni Komite Nasional Indonesia Pusat, yang merupakan cikal-bakal parlemen Indonesia pada 2 September 1948.

¹³ Mohammad Hatta, “Indonesia between Two Power Blocs”, *Foreign Affairs* 36, no. 3 (1958): 483.

¹⁴ Franklin B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Suharto* (New York: Cornell University Press, 1976): 354.

¹⁵ Paige Johnson Tan, “Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia’s Worldview and Foreign Policy”, *Asian Perspective* 31, no. 3 (2007):148.

¹⁶ Daniel Novotny, *Torn between America and China: Elite Perceptions and Indonesian Foreign Policy* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010): 300–301.

Dalam, pidato yang diberi judul “Mendayung di antara Dua Karang” tersebut, Hatta mengatakan:

“Mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seutuhnya.”¹⁷

Potongan pidato menunjukkan bagaimana Hatta mempertanyakan sikap para elite politik yang menunjukkan kecenderungan keberpihakan kepada salah satu negara adikuasa tersebut justru tidak mencerminkan identitas bangsa yang telah terbebas dari belenggu penjajahan. Bagi Hatta, kemerdekaan seutuhnya tercermin dari kemandirian menentukan bagaimana dan kepada siapa hubungan luar negeri Indonesia dijalankan. Selain itu, Indonesia harus menjadi subjek yang berdaya dalam mendefinisikan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Cara pandang Hatta ini terkesan tidak didasarkan pada realitas relasi kuasa dalam politik internasional, terkait terbatasnya ruang manuver dari negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Hal ini memperkuat dugaan bahwa narasi “bebas-aktif” yang disampaikan Hatta sedikit banyak juga merupakan instrumen mobilisasi dukungan politik dalam negeri, ketimbang hanya sekedar merespons situasi lingkungan eksternal.

Dalam perkembangannya, sistem politik domestik yang kompetitif terus membentuk pengejawantahan prinsip bebas-aktif.¹⁸ Pada masa demokrasi parlementer, hal ini terwujud nyata dalam pemaknaan sempit prinsip bebas-aktif semata-mata sebagai sikap tidak menggabungkan diri, baik secara implisit, maupun kasat mata, dalam suatu blok negara adidaya. Prinsip “bebas” selanjutnya dimaknai juga secara lebih lanjut sebagai suatu komitmen untuk dengan sengaja (*deliberate*) menciptakan keseimbangan dalam hubungan Indonesia dengan kedua blok negara adidaya. Menguatnya dominasi Presiden Sukarno dalam perebutan kekuasaan era demokrasi terpimpin memungkinkan dirinya untuk kemudian mewarnai secara signifikan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia kemudian menambahkan secara signifikan karakter anti-kolonialisme dalam bagaimana Indonesia menjalankan prinsip bebas-aktif. Dalam konteks inilah, pelaksanaan kebijakan luar

¹⁷ Lihat Iding Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, *Mohammad Hatta: Kumpulan pidato dari tahun 1942 s.d. 1949* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981).

¹⁸ Weinstein, “Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Suharto,” 163.

negeri betul-betul mewujud dalam usaha-usaha aktif, bahkan cenderung konfrontatif, menolak dominasi *the Old Established Forces* (OLDEFO), demi membangun tata dunia yang lebih adil. Walaupun Indonesia tidak mengambil keberpihakan baik terhadap Amerika Serikat, maupun Uni Soviet, Indonesia mengekspresikan kemandiriannya dalam usaha membentuk blok baru, yang dikenal sebagai *the New Emerging Forces* (NEFO).¹⁹

Pengaplikasian prinsip bebas-aktif kembali mengalami pergeseran-pergeseran di era Orde Baru, terlepas dari realitas lingkungan internasional yang terus diwarnai rivalitas Perang Dingin. Dalam menjelaskan pergeseran-pergeseran tersebut, perubahan struktur domestik tentu tidak dapat dikesampingkan. Kebijakan luar negeri diarahkan untuk melayani dua kepentingan utama penguasa terkait kelangsungan hidup rezim: mewujudkan pembangunan nasional dan menciptakan stabilitas dalam negeri.²⁰ Pada masa awal Orde Baru, hal tersebut kemudian mewujud dalam kebijakan luar negeri yang kurang melihat keluar dan fokus menjalin kedekatan pada negara-negara Blok Barat sebagai sumber bantuan luar negeri.²¹ Setelah Presiden Suharto berhasil melakukan konsolidasi politik dan memperkuat legitimasi kekuasaannya, pengaplikasian prinsip bebas-aktif turut mengalami perubahan. Indonesia mulai mengambil peran kepemimpinan yang lebih aktif yang ditandai dengan posisinya sebagai ketua Gerakan Non-Blok (GNB) pada 1992.²² Para pengamat bahkan mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap prinsip “bebas” setelah Presiden Suharto menandatangani perjanjian keamanan dengan Australia, sebagai upaya untuk menjadi lebih akomodatif terhadap situasi dunia pasca-Perang Dingin.²³

Di era yang lebih kontemporer, literatur kebijakan luar negeri di era reformasi kembali menyarikan konteks-konteks sistemis dan domestik yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa ini, demokratisasi menjadi variabel dominan yang hampir selalu muncul dalam setiap kajian kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam kajian mengenai perilaku kebijakan luar negeri Indonesia, Kai He berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selama era demokratisasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni besarnya tekanan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan legitimasi politik

¹⁹ Dewi Fortuna Anwar, “The Cold War and its impact on Indonesia: Domestic politics and foreign policy,” dalam ed. Albert Lau, *Southeast Asia and the Cold War* (Oxon: Routledge, 2012): 141-143.

²⁰ Michael R. J. Vatikiotis, “Indonesia’s Foreign Policy in the 1990s,” *Contemporary Southeast Asia* 14, no. 4 (1993): 360; Rizal Sukma, “The Evolution of Indonesia’s Foreign Policy: An Indonesian View,” 314.

²¹ Dewi Fortuna Anwar, “The Cold War and its impact on Indonesia: Domestic politics and foreign policy,” 144-146.

²² Lihat Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri di Bawah Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1998)

²³ Rizal Sukma, “Indonesia’s Bebas-Aktif Foreign Policy and the ‘Security Agreement’ with Australia”, *Australian Journal of International Affairs* 51, no. 2 (1997): 235-26.

pemerintahan demokratis.²⁴ Kebijakan luar negeri pada era reformasi juga mulai menyertakan lebih banyak agenda demokrasi dan hak asasi manusia.²⁵ Rizal Sukma menilai bahwa inkorporasi identitas demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh kebutuhan Indonesia memunculkan citra positif di tengah kekhawatiran dunia internasional terhadap dinamika transisi demokrasi Indonesia.²⁶ Meski tingkat implementasinya masih dikatakan rendah, Sukma meyakini bahwa demokrasi akan tetap menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini mengingat besarnya dukungan publik serta kuatnya ketahanan demokrasi Indonesia. Dalam tulisannya, Sukma menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi domestik menjadi prasyarat untuk mendorong pelaksanaan demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia secara riil.

Sementara itu, variabel demokratisasi juga banyak dibahas dalam kajian mengenai proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Studi terdahulu menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan luar negeri di Indonesia terus mempertahankan sifat “negara-sentris” di mana Presiden, Anggota Kabinet, dan Kementerian Luar Negeri menjadi aktor perumus kebijakan utama.²⁷ Namun, transisi demokrasi pasca-1998 pada kenyataannya turut menghadirkan demokratisasi pada proses perumusan kebijakan luar negeri. DPR, publik, dan berbagai pemangku kepentingan lain di luar birokrasi tradisional mulai terlibat dan mempengaruhi dinamika perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.²⁸ Sebagai pakar hubungan internasional terkemuka yang juga menjabat sebagai penasihat presiden dan wakil presiden bidang luar negeri, Dewi Fortuna Anwar menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia era Reformasi dirumuskan di bawah “beberapa pusat kekuasaan”.²⁹ Selain itu, Jurgen Rüland menggarisbawahi peran keaktoran DPR pasca-Orde Baru yang menjadi aktor domestik vokal dan berpengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.³⁰

Konstituen politik domestik juga mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam keputusan Indonesia untuk abstain dalam Resolusi DK PBB no. 1803 tentang sanksi tambahan bagi Iran, Iis Gindarsah menilai bahwa hal ini dipengaruhi oleh adanya aspirasi

²⁴ Kai He, “Indonesia’s Foreign Policy after Soeharto: International Pressure, Democratization, and Policy Change”, *International Relations of the Asia-Pacific* 8, no. 1 (2008): 68-69.

²⁵ Dewi Fortuna Anwar, “The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy”, *Southeast Asian Affairs* (2010): 128-29.

²⁶ Rizal Sukma, “Do New Democracies Support Democracy? Indonesia Finds a New Voice”, *Journal of Democracy* 22, no. 4 (2011): 121.

²⁷ Rizal Sukma, “Recent Developments in Indonesia-China Relations.” *Contemporary Southeast Asia* 16 no.1 (1994): 33-45; Daniel Novotny, “Indonesian Foreign Policy: A Quest for the Balance of Threats: The Role and Relevance of Elite Perceptions in Explaining Indonesian Foreign Policy Outcomes.” Disertasi PhD, Department of Indonesian Studies, School of Politics and International Relations, University of New South Wales.

²⁸ Anwar, “The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy”, 129.

²⁹ Ibid.

³⁰ Jurgen Rüland, “Deepening ASEAN Cooperation through Democratization? The Indonesian Legislature and Foreign Policymaking,” *International Relations of the Asia-Pacific* 9, no. 3 (2009): 396.

masyarakat dan preferensi politik kelompok kepentingan di tingkat domestik. Kelompok Islam menuntut keselarasan kebijakan luar negeri Indonesia dengan negara Islam, sementara partai politik yang dihadapkan pada kekecewaan pasca-*reshuffle* kabinet memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan tekanan politik pada Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono kemudian mengikuti tuntutan ini demi mengamankan dukungan publik serta koalisi partai untuk pencalonannya sebagai Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2009. Hal ini menggambarkan bahwa DPR dan kelompok kepentingan pada era Reformasi memiliki kekuatan untuk memengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sosial-politik.³¹

Pasca Reformasi, Kementerian Luar Negeri juga telah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan eksternal dalam kebijakan luar negeri. Upaya ini pertama kali dilakukan di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda (2001–2009). Sebagaimana dikemukakan Bantarto Bandoro, Kementerian Luar Negeri di bawah *Hassan Initiative* tidak lagi memandang institusinya sebagai satu-satunya aktor penting dalam proses kebijakan luar negeri.³² Lembaga tersebut telah memperluas partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hal ini menyiratkan bahwa dalam konteks politik pasca-otoritarianisme, pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia telah menjadi lebih “deliberatif dan konsultatif”.³³ Interaksi dengan aktor-aktor berpengaruh di luar birokrasi telah difasilitasi melalui forum-forum seperti “*foreign policy breakfast*”, di mana Kementerian Luar Negeri berkonsultasi dengan pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dan menerima masukan tentang isu-isu kebijakan luar negeri tertentu.³⁴ Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kini melanjutkan kembali inisiatif ini setelah sempat meredup pada masa kepemimpinan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.³⁵ Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia era kontemporer, peran aktor eksternal tidak dapat diabaikan sepenuhnya meskipun aktor-aktor dalam birokrasi masih mempertahankan posisinya yang relatif sentral.

Literatur kebijakan luar negeri Indonesia yang berkembang dari era kemerdekaan hingga reformasi lantas dapat dikatakan mencirikan sebuah pola, yakni bahwa dalam

³¹ Iis Gindarsah, “Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007-2008”, *Contemporary Southeast Asia* 34, no. 3 (2012): 423–24 & 427–29.

³² Lihat Bantarto Bandoro, “The Hassan Initiative dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia.” Dalam ed. Bantarto Bandoro, *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2005).

³³ Greta Nabbs-Keller, “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership.” *Contemporary Southeast Asia* 35 no.1 (2013): 57.

³⁴ Anwar, “The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy”, 126-141.

³⁵ Jürgen Rüland, “Democratizing Foreign-Policy Making in Indonesia and the Democratization of ASEAN: A Role Theory Analysis.” *TRaNS: Trans - Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 5 no.1 (2016): 49-73.

pelaksanaannya, kebijakan luar negeri Indonesia selalu mempertimbangkan konteks sistemis dan domestik yang meliputinya. Di tingkat sistemis, persaingan strategis antarnegara besar memberikan pertimbangan mengenai manuver politik yang dapat dijalankan Indonesia di lingkup internasional. Sementara itu, perubahan struktur dan dinamika perebutan kekuasaan di tingkat domestik kerap menjadi penentu arah kebijakan luar negeri yang diambil. Oleh karena itu, pengkajian terhadap kebijakan luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kedua variabel tersebut.

Pilar-pilar Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Semenjak kemerdekaan Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten pada prinsip “bebas aktif”. Meski demikian, interpretasi dari prinsip bebas aktif mengalami pergeseran di dalam setiap periode kepemimpinan. Pada tahun 2014, ketika Jokowi diangkat menjadi presiden, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai “Kebijakan Luar Negeri Pro-Rakyat,” atau “Diplomasi Membumi.” Kebijakan ini menempatkan hubungan eksternal Indonesia sebagai sebuah sarana yang dapat dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia.³⁶ Pemerintah menjadikan diplomasi sebagai sebuah sarana bagi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pembangunan di level domestik, khususnya dalam perihal mendatangkan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri.³⁷

Jokowi mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahannya akan tetap mengacu pada prinsip bebas aktif, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia pada Pembukaan UUD 1945.³⁸ Meski begitu, interpretasi Jokowi atas “politik bebas-aktif” merupakan sebuah interpretasi yang bersifat pragmatis, di mana pemerintah Indonesia menekankan bahwa Indonesia tidak akan menoleransi negara yang mengancam kepentingan nasionalnya. Jokowi memberlakukan sebuah pendekatan yang lebih berorientasi ke dalam (*inward-looking*) dibandingkan dengan kebijakan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan partisipasi aktif Indonesia di tingkat regional dan global, dan memberlakukan slogan “*a thousand friends, zero enemy.*”^{39,40}

³⁶ Muhammad Tri Andika, “An Analysis of Indonesia’s Foreign Policy under Jokowi’s Pro-People Diplomacy”. *Indonesian Perspective* 1, no. 2 (2016), 1-10.

³⁷ Lihat Achmad Sukarsono et al, “The Next Indonesian Presidency and The Future of Malaysia-Indonesia Relations,” *Institute of Strategic and International Studies Focus Report*, 2014.

³⁸ Interview with H.E. Hermono, Ambassador of Indonesia to Malaysia, 2021.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Lihat Gerardy Grananda Putra, “A Comparative Analysis of Indonesia’s Foreign Policy Towards ASEAN under Joko Widodo and Susilo Bambang Yudhoyono Presidency” Dissertation, University of Glasgow, 2016.

Pada periode kedua kepresidenan Jokowi, beberapa perubahan terlihat di dalam kebijakan Luar Negeri Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia tetap mempertahankan isu pembangunan ekonomi dalam negeri di bawah kerangka “diplomasi membumi”, terdapat upaya untuk memperkenalkan ulang peran aktif Indonesia dalam komunitas internasional.⁴¹ Di level regional, hal ini ditandai dengan meningkatnya peran Indonesia dalam ASEAN, di mana Indonesia mengajukan beberapa inisiatif besar, seperti *Code of Conduct* di Laut Tiongkok Selatan, *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, dan *New Narrative of ASEAN Identity*. Indonesia juga mengusulkan inisiatif yang merespons potensi *travel bubble* pasca pandemi COVID-19, melalui ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF).

Di tingkat internasional, partisipasi Indonesia juga terlihat dalam berbagai kerja sama multilateral. Keaktifan Indonesia dapat terlihat di dalam Kerja sama Selatan-Selatan Triangular (KSST), yang memberikan model alternatif bagi pembangunan di negara-negara berkembang. Indonesia juga meningkatkan perannya di PBB, di mana Indonesia ditetapkan sebagai anggota non-permanen DK PBB periode 2019-2020 dan Anggota Dewan HAM PBB periode 2019-2022. Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia diangkat menjadi presiden G20, di mana Indonesia mengangkat tema pemulihan ekonomi dunia. Bagian selanjutnya di dalam tulisan ini, akan membahas lebih detail peran aktif Indonesia di bawah kerangka kerja sama-kerja sama regional dan multilateral.

Meskipun kebijakan luar negeri Indonesia dapat memengaruhi pendekatan Indonesia pada ASEAN, semenjak pendiriannya, Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam kebijakan luar negerinya. Sebagai negara dengan populasi dan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mendorong Jakarta untuk menjadi ibukota diplomatik Asia Tenggara, di mana sekretariat ASEAN berdiri. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara pendiri ASEAN pada 1967 dan hingga kini secara aktif menganggap ASEAN sebagai elemen penting dalam kebijakan luar negerinya.⁴²

Indonesia secara aktif mempromosikan beberapa norma keamanan yang hingga kini menjadi pegangan strategis bagi ASEAN, seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC), Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) dan Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone (SEANFWZ). Indonesia juga menginisiasi salah satu pilar Masyarakat ASEAN, yaitu Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN di era Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Dalam

⁴¹ Agnes Anya, “Indonesia vies for spot on UN Human Rights Body.” The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/17/indonesia-vies-for-spot-on-un-human-rights-body.html>, diakses 29 Januari 2021.

⁴² Dewi Fortuna Anwar. “Indonesia’s Foreign Policy After the Cold War” *Southeast Asian Affairs*, 1994, 146–49.

situasi geopolitik Indo-Pasifik kontemporer, Indonesia merupakan negara yang memelopori AOIP.⁴³

Indonesia selalu menjunjung sentralitas ASEAN sebagai organisasi regional yang relevan dan inklusif dalam lingkungan strategis di Asia Tenggara. Dalam berbagai masalah regional seperti konflik di Laut Tiongkok Selatan dan instabilitas politik di Myanmar, Indonesia mendorong ASEAN sebagai institusi penting untuk menciptakan resolusi konflik. Dalam melakukan diplomasi di Kawasan, Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN seperti pengambilan keputusan melalui konsensus dan mencegah intervensi dalam urusan dalam negeri anggotanya. Peran aktif Indonesia dalam resolusi konflik terlihat pada keterlibatan Indonesia sebagai mediator dalam sengketa Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja.⁴⁴ Pada tahun 2017, Indonesia juga sempat menawarkan diri untuk menjadi mediator di antara pemerintah Myanmar dan Rakhine State.⁴⁵

Selain itu, Indonesia secara aktif mengedepankan forum-forum yang berfokus pada ASEAN seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS) dalam dialog-dialog strategis di kawasan. Pada era kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2011, Indonesia menerima dua negara besar eksternal sebagai anggota EAS, yaitu Amerika Serikat dan Rusia.⁴⁶ Peran Indonesia sebagai salah satu motor integrasi regional di bidang keamanan melalui sentralitas ASEAN dapat menjadi bentuk otonomi strategis (*strategic autonomy*) yang memperkuat posisi Indonesia dan relevansi ASEAN di tengah persaingan negara-negara besar di kawasan dan inisiatif ekstra-regional yang mempengaruhi geopolitik Asia Tenggara, terutama *Free and Open Indo-Pacific*, *QUAD*, dan *AUKUS* yang dipelopori Amerika Serikat.

Prioritas Indonesia pada sentralitas ASEAN dapat dilihat sebagai bentuk kepemimpinan regional Indonesia di Asia Tenggara dalam mempromosikan integrasi di bidang politik-keamanan. Selain itu, sifat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang memungkinkan kerja sama dengan berbagai kekuatan besar dan regional juga menjadi pemberi signifikansi bagi kepemimpinan regional Indonesia dan perhatiannya terhadap sentralitas ASEAN seiring kekhawatiran negara-negara ASEAN terhadap persaingan AS dan Tiongkok di kawasan.

KSST merupakan salah satu kerja sama multilateral yang dilandasi atas solidaritas negara-negara berkembang yang berlandaskan kesetaraan (*mutual opportunity*) dan saling

⁴³ Langgeng Gilang Pangestu, et al, "Strategi Indonesia Mewujudkan Asean Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas Di Kawasan Indo-Pasifik" *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 26. No .1 (2021), 1-5.

⁴⁴ Rezky Antuli et al. "Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception" *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11 (2019). 448.

⁴⁵ Sundary, et al. "Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar", *Jurnal Niara* 14, no.1 (Jurnal Niara. 14:01), 177-187.

⁴⁶ Marty Natalegawa, *Does ASEAN Matter? A View from Within* (Singapura: ISEAS, 2018), 85-90.

menguntungkan (*mutual benefit*).⁴⁷ Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai KSST melalui penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Hingga hari ini, KAA menjadi dasar bagi negara-negara berkembang Selatan untuk mempromosikan kerja sama praktik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya; serta mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara-negara maju di Utara. KAA dipandang sebagai sarana bagi negara-negara berkembang untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan di bidang pembangunan.

Solidaritas negara-negara Selatan telah berkembang dari sebuah gagasan, menjadi kerja sama teknis yang lebih konkret bagi Indonesia melalui KSST. Sejak tahun 1980-an, peran Indonesia mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan melalui program Kerja sama Teknik Negara Berkembang (KTNB).⁴⁸ Indonesia berperan aktif dalam melakukan pengiriman tenaga ahli, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas, menjadi rekan dalam pengembangan riset dan teknologi, meminjamkan alat-alat, serta memberikan beasiswa bagi mahasiswa negara-negara Selatan lainnya.⁴⁹ Pada tahun 2013, Indonesia telah mendirikan Direktorat Kerja Sama Teknik di bawah Kementerian Luar Negeri RI untuk menangani KSST dan merintis Badan Koordinasi Nasional KSST yang mengatur komunikasi antarlembaga di Indonesia di bawah kerangka KSST. Indonesia juga membuat sebuah peta jalan pelaksanaan KSST 2011-2015, yang dilanjutkan dengan rencana kerja 2015-2019 yang memuat arti penting KSST bagi kepentingan nasional Indonesia.⁵⁰

Tidak hanya itu, Indonesia juga telah menempatkan KSST menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia. Sebagai negara kekuatan menengah, KSST menyediakan sebuah platform bagi Indonesia untuk bisa menunjukkan kepemimpinannya di dunia internasional dan menampilkan dirinya sebagai sebuah negara yang mendorong pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang di selatan.⁵¹

Peran Indonesia dalam G20 dapat ditarik dari dua fenomena, yaitu: (i) krisis finansial yang dialami Indonesia tahun 1997-1998 yang mengakibatkan krisis politik; dan (ii) peningkatan pengaruh geoekonomi Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat yang dialami Indonesia dan masuknya Indonesia sebagai 20 ekonomi terbesar di dunia. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan G20 baik ketika G20 masih berbentuk

⁴⁷ Lihat Freddy Tobing et al, *Buku Saku Kerja sama Selatan-Selatan dan Peran Indonesia* (Jakarta: CIRES, 2018)

⁴⁸ Lihat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, *Kajian Mandiri: Reorientasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bagi kepentingan Nasional* (Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2015)

⁴⁹ Lihat Stanislaus R. Apresian, "Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional UNPAR*, 12:2. (2017)

⁵⁰ Lihat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, "Kajian Mandiri: Reorientasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bagi kepentingan Nasional", 2015.

⁵¹ Tobing et al, "Buku Saku Kerja sama Selatan-Selatan dan Peran Indonesia ", 2018.

pertemuan menteri ekonomi maupun ketika sudah menjadi pertemuan rutin kepala negara pascakrisis finansial global 2008.⁵² Indonesia tercatat selalu mengirimkan kepala negara (presiden) dalam delegasinya ke setiap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Indonesia melihat posisinya di G20 sebagai perwakilan beberapa kelompok negara yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia, seperti sebagai negara ekonomi berkembang, satu-satunya negara Asia Tenggara, negara penting dalam Kerja sama Selatan-Selatan serta negara mayoritas Muslim. Keikutsertaan Indonesia dalam G20 juga dapat dilihat sebagai bagaimana Indonesia memiliki peluang untuk menjalankan otonomi strategis dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, fokus Indonesia dalam G20 juga dapat dikatakan dengan fokus kebijakan domestik Indonesia, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Indonesia memegang kepresidenan G20 pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan puncak penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada 30-31 Oktober 2022. Pemulihan ekonomi dunia dan solidaritas masyarakat internasional setelah pandemi COVID-19 menjadi fokus utama kepresidenan G20 Indonesia yang mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Dalam kepresidenan Indonesia, Indonesia mengusung berbagai tema dan isu yang sudah menjadi bahasan rutin Indonesia dalam KTT-KTT G20 sebelumnya, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, mencegah proteksionisme dalam perdagangan internasional, mendorong kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk ikut serta dalam tata kelola perekonomian global, mendukung peluang-peluang investasi dan perjanjian perdagangan baru, dan meningkatkan konektivitas antara ekonomi-ekonomi besar di dunia. Dalam konteks pandemi COVID-19, Indonesia juga menyuarakan isu-isu prioritas dalam kebijakan luar negerinya untuk kepresidenan G20, seperti pemerataan akses vaksin, peningkatan ketahanan sistem internasional untuk mengantisipasi penyakit menular dan upaya-upaya membangkitkan sektor pariwisata secara aman setelah pandemi.⁵³

PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki peranan besar dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Tepat satu tahun setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia via Konferensi Meja Bundar, PBB mengakui Indonesia sebagai anggota ke-60 dengan suara

⁵² Winfried Weck, "ASEAN and G20 - Indonesia's Foreign Policy Perspective" *KAS International Reports* 2 (2011), 30-34.

⁵³ Bank Indonesia, "Kepresidenan G20 Indonesia 2022" <https://www.bi.go.id/id/G20/Default.aspx>, diakses 2 November 2021.

bulat. Bergabungnya Indonesia ke dalam PBB secara tidak langsung menunjukkan bahwa setiap negara anggota PBB telah mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat.⁵⁴

PBB, sebagai organisasi internasional terbesar yang memiliki keanggotaan yang bersifat universal, menjadi salah satu platform untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang semakin kompleks dan bersifat multidimensi di masa depan.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia untuk terus terlibat aktif di dalam dunia internasional guna menjaga perdamaian dunia. Dalam beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menunjukkan peran aktifnya di dalam PBB.

Pada tahun 2018, untuk keempat kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode tahun 2019-2020 bersama dengan Afrika Selatan, Jerman, Belgia dan Republik Dominika. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota non-permanen DK PBB menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan nasional Indonesia untuk memperkuat ekosistem atau perdamaian dan stabilitas global. Indonesia mengusulkan beberapa poin di dalam keanggotaannya, yaitu: (i) Pengutamaan dialog untuk menyelesaikan permasalahan; (ii) membangun sinergi dengan organisasi regional untuk menjaga perdamaian kawasan; (iii) meningkatkan kerja sama antar anggota DK PBB untuk memerangi terorisme; dan (iv) menjaga perdamaian dunia melalui upaya yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.⁵⁶

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan bahwa keanggotaan Indonesia di DK PBB akan diarahkan untuk membawa manfaat yang tepat guna bagi masyarakat Indonesia, sesuai dengan prinsip politik luar negeri membumi. Partisipasi Indonesia di dalam DK PBB merupakan perwujudan mandat konstitusional UUD 1945 alinea keempat untuk “menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁵⁷ Hal ini juga sejalan dengan kepentingan untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional di dalam berbagai isu yang menyangkut tentang keamanan dan perdamaian dunia melalui perspektif bebas-aktif.⁵⁸ Keanggotaan Indonesia di DK PBB juga akan menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk membuka investasi politik, sehingga

⁵⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Diakses pada https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb (5 November 2021)

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Keanggotaan Indonesia pada DK PBB,” https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb, diakses 4 November 2021.

⁵⁷ Fatimatuzzahro, “Apa Peran Indonesia di DK PBB Selama ini?” Tirto ID. Diakses dari <https://tirto.id/apa-peran-indonesia-di-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb-selama-ini-ggje>, diakses 5 November 2021.

⁵⁸ Kementerian Luar Negeri RI, “Perserikatan Bangsa-Bangsa”, 2021.

Indonesia bisa memperluas jaringannya di dunia internasional. Hal ini membuka peluang yang lebih besar untuk melakukan kerja sama teknik kepada negara-negara berkembang lainnya.⁵⁹

Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia adalah bentuk komitmen Indonesia terhadap salah satu tujuan nasionalnya yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dipelopori oleh pengiriman misi Garuda pertama ke Kongo tahun 1961 di tengah perang saudara di sana. Per September 2021, Indonesia tercatat mengirimkan sekitar 2.818 pasukan perdamaian dalam sembilan misi PBB. Hal ini memosisikan Indonesia sebagai negara kedelapan dari total pasukan perdamaian dan yang terbesar di Asia Tenggara.⁶⁰ Negara yang menjadi tujuan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia saat ini adalah Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan, Mali, Sudan Selatan, dan Somalia. Sebelumnya, secara historis Indonesia pernah mengirimkan pasukan perdamaian, termasuk dalam jumlah cukup besar, dalam beberapa wilayah konflik dan pascakonflik seperti Kamboja, eks-Yugoslavia, Liberia, dan Timor-Leste. Selain itu, Indonesia juga memiliki persentase pengiriman pasukan perdamaian yang cukup tinggi. Bulan September 2021, jumlah pasukan perdamaian perempuan Indonesia berjumlah 179 orang, terbanyak kedelapan di dunia dan mencapai 7% dari total pasukan perdamaian Indonesia yang seluruhnya berjumlah 2.818 orang.⁶¹ Selain itu, selama menduduki kursi sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020, isu pasukan perdamaian menjadi salah satu isu yang menjadi fokus bahasan Indonesia, khususnya terkait penguatan peran pasukan perdamaian perempuan dalam konflik dan perlindungan pekerja perdamaian yang menjadi fokus resolusi yang diinisiasi Indonesia.⁶²

Indonesia secara aktif berkontribusi bagi Dewan HAM PBB sejak pembentukan lembaga tersebut tahun 2006. Indonesia melihat perubahan politik yang terjadi di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru dan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi sebagai bentuk komitmennya untuk memperjuangkan HAM dalam forum internasional, terutama Dewan HAM PBB. Indonesia tercatat sudah lima kali menjadi anggota Dewan HAM

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ United Nations Peacekeeping. "Troop and police contributors" <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>, diakses 2 November 2021.

⁶¹ Ibid.

⁶² Kementerian Luar Negeri, "Indonesia Calls for Greater Participation of Women in Peacekeeping" <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/6902/indonesia-calls-for-greater-participation-of-women-in-peacekeeping>, diakses 2 November 2021.

PBB, yaitu pada 2006-2007 (periode pertama), 2009-2010, 2013-2014, 2015-2017, dan 2020-2022.⁶³ Dalam keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB 2020-2022, Indonesia mengusung tema “*A True Partner for Democracy, Development and Social Justice*”. Beberapa isu utama yang diangkat Indonesia antara lain fokus pada penyelesaian masalah HAM di Indonesia, hak-hak ekonomi dan sosial bagi perempuan dan anak-anak, dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga mendorong peningkatan efektivitas mekanisme Dewan HAM PBB dan membuka dialog konstruktif dengan prinsip universalitas.⁶⁴ Keanggotaan rutin Indonesia dalam Dewan HAM PBB dapat dilihat sebagai bentuk bagaimana isu-isu yang selama ini menjadi bagian *low politics* seperti hak asasi manusia kini menjadi bagian dari isu-isu utama yang diperjuangkan diplomasi Indonesia sebagai nilai tawarnya di forum internasional, terutama belajar dari pengalaman dalam negeri Indonesia dalam mengelola masalah-masalah HAM.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Angka

Tim peneliti menggunakan beberapa dataset untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu dataset misi perdamaian, dataset traktat internasional, dan dataset dukungan Indonesia di Majelis Umum PBB. Dataset misi perdamaian, mencakup seluruh misi perdamaian di bawah naungan PBB yang diikuti oleh Indonesia mulai tahun 1990 hingga 2021. Indonesia telah mengikuti 37 misi perdamaian.

⁶³ CNN Indonesia, “Indonesia Terpilih jadi Anggota Dewan HAM PBB untuk Kelima Kalinya” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191017230233-106-440552/indonesia-terpilih-jadi-dewan-ham-pbb-untuk-kelima-kalinya>, diakses 3 November 2021.

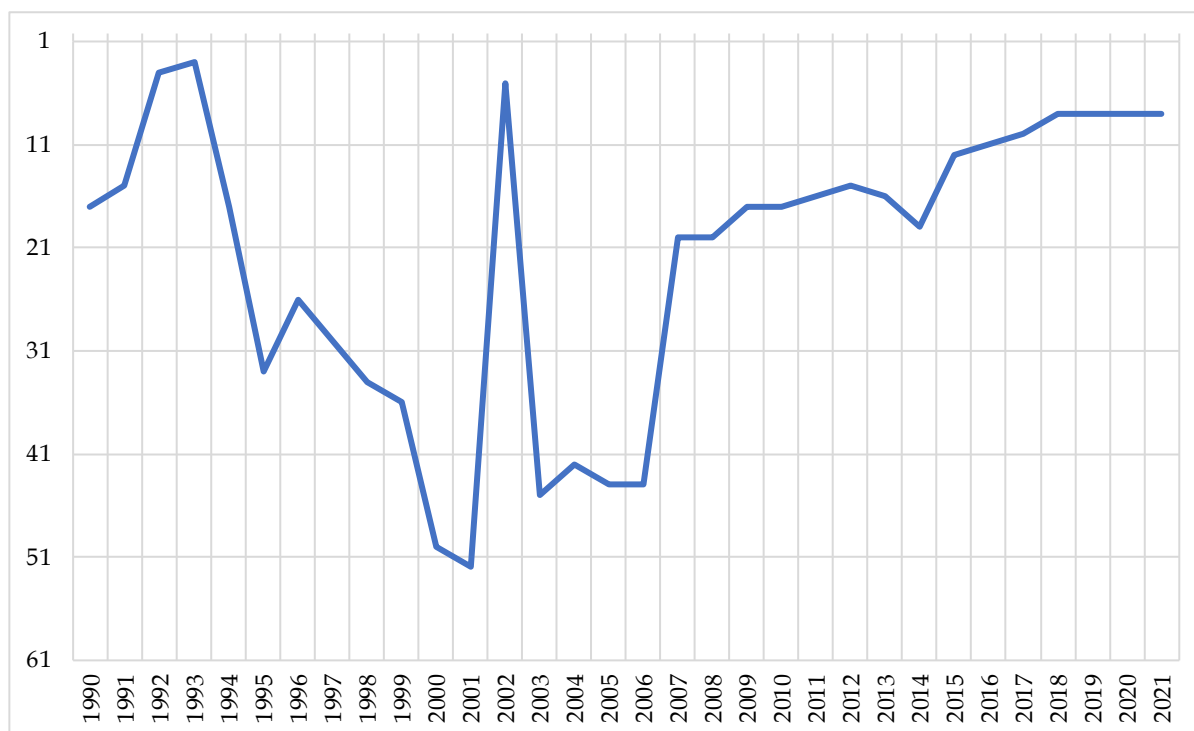
⁶⁴ Kementerian Luar Negeri, “Anggota PBB Kembali Percayakan RI sebagai Anggota Dewan HAM PBB” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/693/berita/anggota-pbb-kembali-percayakan-indonesia-menjadi-anggota-dewan-ham-pbb>, diakses 3 November 2021.

Tabel 1. Data Misi Perdamaian Yang Diikuti oleh Indonesia

Jenis Misi	Kepanjangan	Terjemahan	Tahun
UNIIMOG	United Nations Iran-Iraq Military Observer Group	Kelompok Pengamat Militer PBB di Iran-Irak	1988-1991
UNIKOM	United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission	Misi Pengamat PBB di Irak-Kuwait	1991-2003
UNAMIC	United Nations Advance Mission in Cambodia	Misi Pemajuan PBB di Kamboja	1991-1992
UNTAC	United Nations Transitional Authority in Cambodia	Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja	1992-1993
UNPROFOR	United Nations Protection Force	Kekuatan Penjaga Perdamaian	1992-1995
ONUMOZ	United Nations Operation in Mozambique	Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mozambique	1994
UNOSOM II	United Nations Operation in Somalia II	Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia II	1994
UNOMIG	United Nations Observer Mission in Georgia	Misi Pengamat PBB di Georgia	1993-2007
UNPREDEP	United Nations Preventive Deployment Force	Pasukan Pencegahan PBB	1995-1999
UNCRO	United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia	Operasi Pemulihan Keyakinan PBB di Kroasia	1995-1996
UNPF	United Nations Peace Forces	Pasukan Perdamaian PBB	1996
UNTAES	United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium	Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Slavonia Timur, Baranja dan Sirmium Barat	1996-1998
IPTF	UN International Police Task Force	Pasukan Polisi Internasional PBB	1996
UNMOP	UN Mission of Observers in Prevlaka	Misi Pengamat PBB di Prevlaka	1996-2002
UNMIBH	United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina	Misi PBB di Bosnia dan Herzegovina	1996-2002
UNMOT	United Nations Mission of Observers in Tajikistan	Misi Pengamat PBB di Tajikistan	1994-2002
UNPSG	United Nations Civilian Police Support Group	Kelompok Penyokong PBB untuk Polisi Sipil	1998-1998
UNAMET	United Nations Mission in East Timor	Misi PBB di Timor Timur	1999-1999
UNAMSIL	United Nations Mission in Sierra Leone	Misi PBB di Sierra Leone	1999-2006
MONUC	United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo	Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo	1999-2010
UNAMA	United Nations Assistance Mission in Afghanistan	Misi bantuan PBB di Afghanistan	2002-2022
UNMIL	United Nations Mission in Liberia	Misi PBB di Liberia	2003-2018
UNMIS	United Nations Mission in the Sudan	Misi PBB di Sudan	2005-2011
UNIFIL	United Nations Interim Force in Lebanon	Pasukan Sementara PBB di Lebanon	1978-2021
UNMIN	United Nations Mission in Nepal	Misi PBB di Nepal	2007-2011

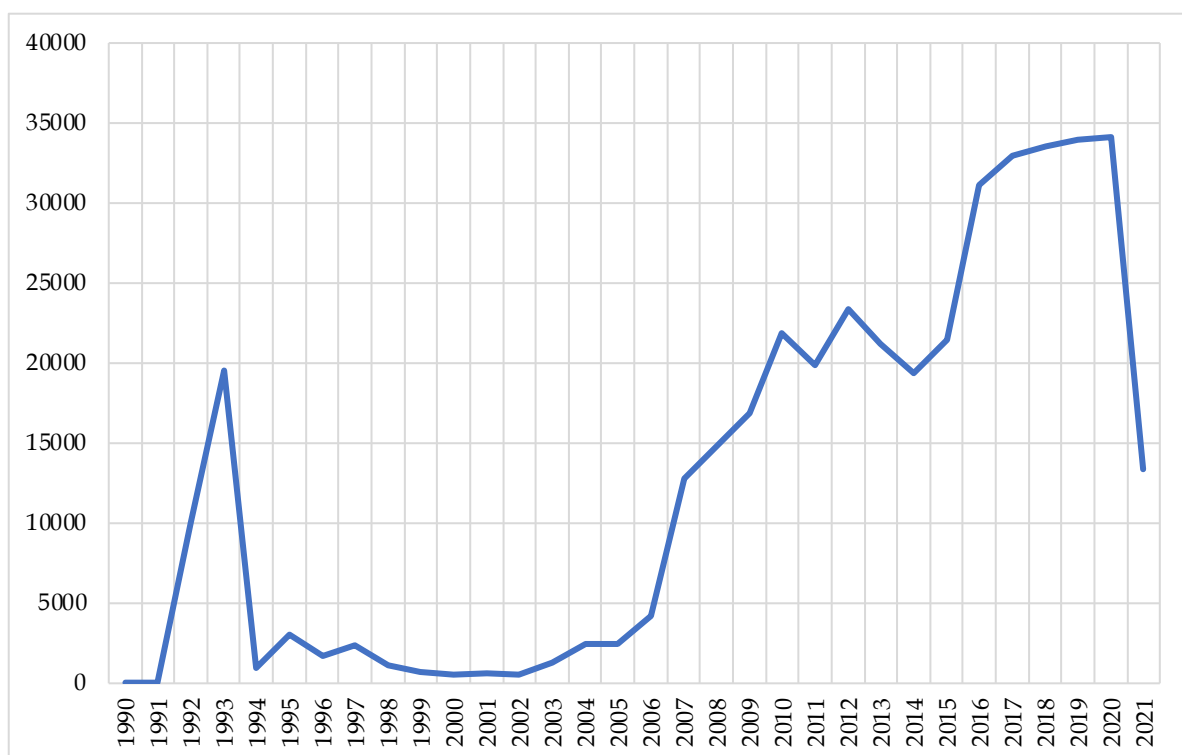
Jenis Misi	Kepanjangan	Terjemahan	Tahun
UNAMID	African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur	Misi Uni Afrika-PBB di Darfur	2007-2021
MINUSTAH	United Nations Stabilisation Mission in Haiti	Misi Stabilisasi PBB di Haiti	2004-2017
MONUSCO	United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo	Misi Stabilisasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo	2010
UNMISS	United Nations Mission in South Sudan	Misi PBB di Sudan Selatan	2011
MINURSO	United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara	Misi PBB untuk Referendum di Sudan Selatan	1991
MINUSCA	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic	Misi Stabilisasi Multidimensional Terintegrasi PBB di Republik Afrika Tengah	2014
MINUSMA	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali	Misi Stabilisasi Multidimensional Terintegrasi PBB di Mali	2013
UNISFA	United Nations Interim Security Force for Abyei	Pasukan Sementara PBB untuk Abyei	2011
UNSMIS	United Nations Supervision Mission in Syria	Misi Supervisi PBB di Suriah	2012
MINUJUSTH	United Nations Mission for Justice Support in Haiti	Misi PBB untuk Dukungan Keadilan di Haiti	2017-2019
UNMHA	UN Mission to support the Hudaydah Agreement	Misi PBB untuk Mendukung Perjanjian Hudaydah	2019
UNFIL	United Nations Interim Force in Lebanon	Pasukan Sementara PBB di Lebanon	2003-2018

Bagan 1. Perkembangan Peringkat Jumlah Personel Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB, 1990 - 2021



Dalam peringkat jumlah personel yang dikirim, Indonesia pernah menempati posisi 4 pada tahun 1992. Posisi ini kemudian membaik menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Tren penurunan peringkat Indonesia kemudian terjadi mulai dari tahun 1994 dan mencapai titik terendah pada tahun 2002 dengan posisi 50. Peringkat Indonesia kemudian perlahan membaik dan mengalami tren peningkatan hingga sekarang. Sejak tahun 2018, Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirim personel penjaga perdamaian ke-8 di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang cukup aktif di panggung internasional.

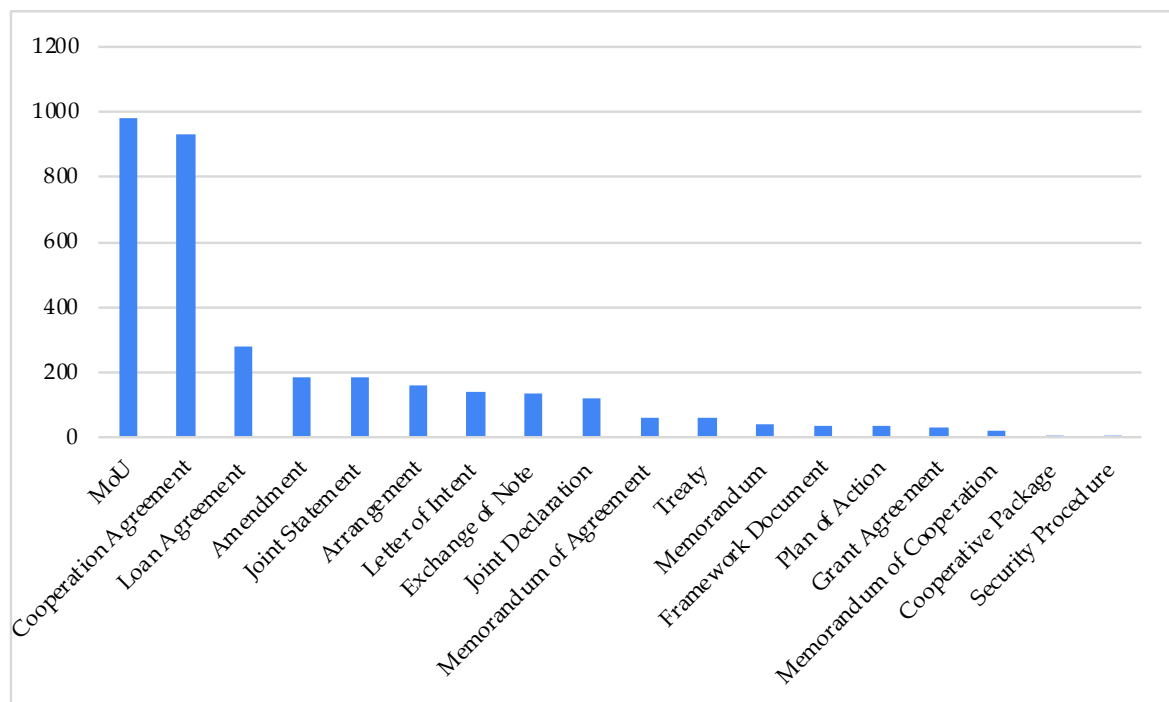
Bagan 2. Perkembangan Jumlah Personel Keseluruhan Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB, 1990 - 2021



Pengecekan jumlah personel yang dikirimkan juga menunjukkan tren yang linear dengan pemeringkatan dunia. Pada tahun 1990, Indonesia baru mengirimkan 5 personel. Angka pada tahun 1993 mencapai 19.552 personel. Terjadi penurunan dan kenaikan di tahun-tahun yang sama dengan tren pemeringkatan, dan angka tertinggi Indonesia baru dicapai kembali pada tahun 2010 ketika Indonesia mengirimkan 21.842 total personel. Indonesia mencapai angka tertingginya pada tahun 2020 lalu dengan 34.143 total personel. Jumlah yang besar ini belum dapat membuat Indonesia mencapai rekor peringkatnya yang terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara yang aktif juga semakin banyak mengirimkan personel penjaga perdamaian.

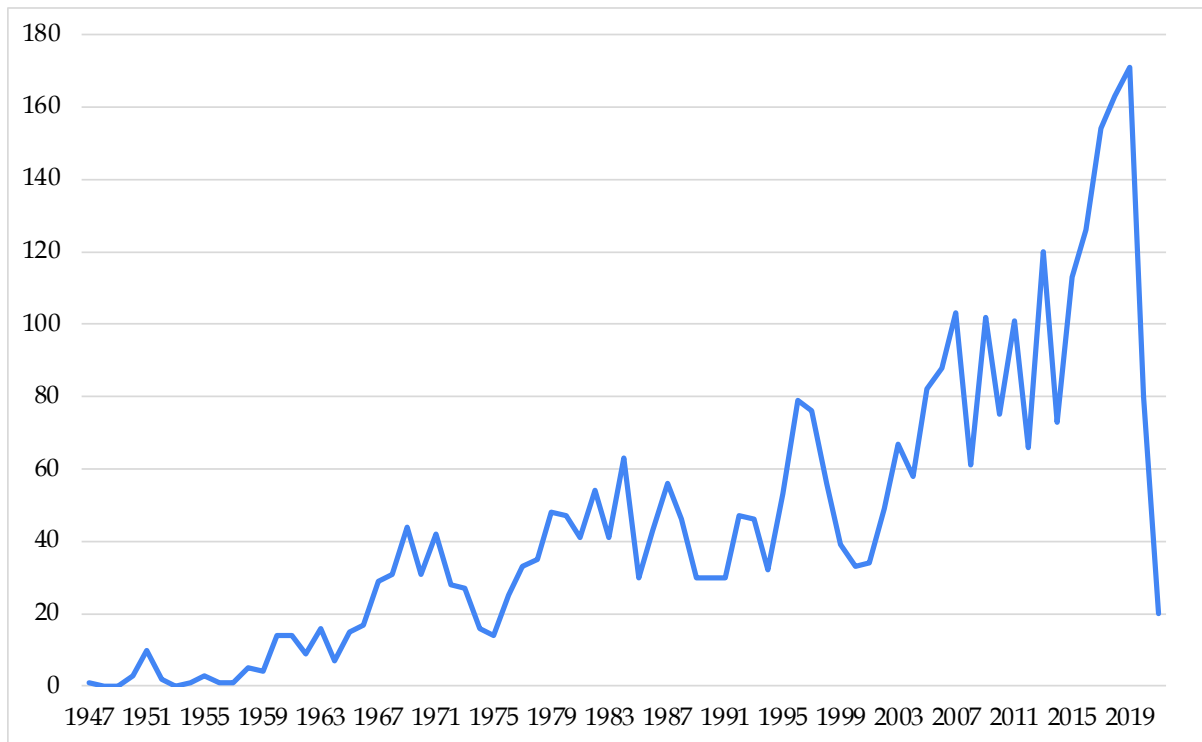
Terdapat lima jenis personel yang Indonesia kirim: pasukan, polisi individu, unit polisi, staf atau petugas, dan tenaga ahli. Pasukan perdamaian menjadi jenis yang paling banyak Indonesia kirim diikuti dengan polisi individu. Indonesia baru mengirim staf atau petugas pada tahun 2017. Tenaga ahli dan unit polisi juga baru tercatat dikirim oleh Indonesia pada tahun 2010. Data tahun tersebut juga mencakup awal dicatatnya pengiriman personel perempuan oleh Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kebutuhan atau bahkan perubahan paradigma resolusi konflik di dunia.

Bagan 3. Perbandingan Jumlah Traktat yang Ditandatangani Indonesia berdasarkan Jenisnya



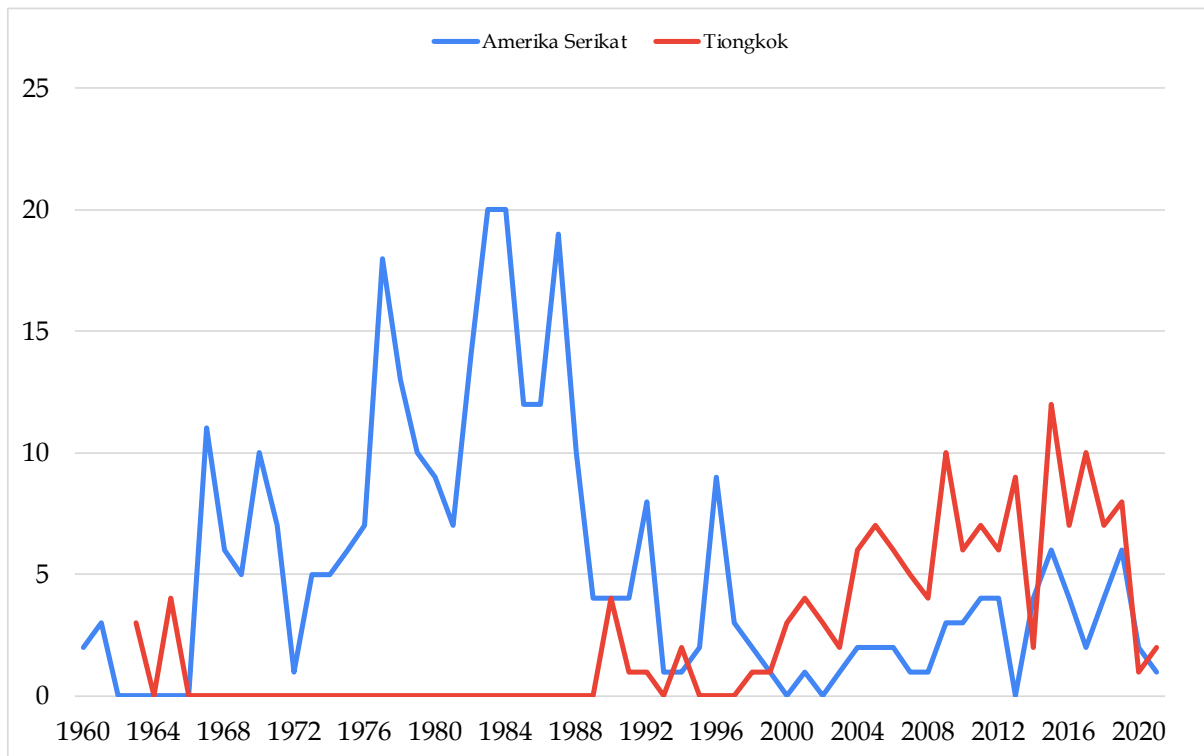
Data lainnya yang tim penulis gunakan dalam adalah jumlah traktat yang Indonesia keluarkan mulai dari awal kemerdekaannya hingga sekarang. Tim penulis melakukan kategorisasi terhadap menjadi 18 tipe dokumen, yakni *Amendment (Amd)*, *Arrangement/Letter of Arrangement (Arr)*, *Cooperation Agreement (semua perjanjian yang bernuansa kerja sama) (CoopA)*, *Cooperative Package (CP)*, *Exchange of Note / Exchange of Letter (EoN)*, *Framework Document (FD)*, *Grant Agreement (GrtA)*, *Joint Announcement / Joint Declaration (JA)*, *Joint Communique / Joint Statement (JC)*, *Letter of Intent (LoI)*, *Loan Agreement (LoanA)*, *Memorandum (Memo)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, *Memorandum of Cooperation (MoC)*, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Plan of Action / Work Plan (PoA)*, *Security Procedure (SP)*, dan *Treaty (Convention) (T)*.

Bagan 4. Perkembangan Jumlah Traktat yang Ditandatangani Indonesia, 1947 - 2021



Traktat yang Indonesia susun paling banyak bersifat bilateral, diikuti dengan traktat multilateral atau regional, serta beberapa dokumen yang bersifat trilateral. Dalam data ini, Indonesia juga menyusun traktat dengan organisasi internasional, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Indonesia paling banyak menyusun traktat pada tahun 2019 dengan jumlah 171 dokumen. Dari rentang tahun 2007 sampai 2021, Indonesia telah melebihi 100 dokumen per tahun pada sembilan tahun. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam periode satu, Indonesia secara konsisten menghasilkan dokumen perjanjian dengan jumlah tinggi dan terus meningkat: 113, 126, 154, 163, dan 171 untuk tiap tahunnya. Angka ini kemudian menurun ke 80 pada tahun 2020. Hal ini dapat diakibatkan oleh fokusnya pemerintahan pada urusan domestik atau COVID-19 yang mulai muncul di kuartil dua tahun 2020.

Bagan 5. Perkembangan Jumlah Traktat yang Ditandatangani Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, 1961 - 2021



Dari data traktat, terlihat bahwa Indonesia paling banyak menyusun perjanjian dengan Amerika Serikat sebanyak 335 buah dokumen. Apabila dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki 144 buah perjanjian dengan Indonesia, Amerika Serikat tampak unggul. Namun, perlu diingat bahwa relatif rendahnya perjanjian dengan Tiongkok disebabkan oleh adanya kerenggangan dalam sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Setelah tahun 2000, Tiongkok memiliki 127 perjanjian dengan Indonesia, sementara Amerika Serikat hanya mempunyai 53 perjanjian dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya intensifikasi hubungan antara Indonesia-Tiongkok pada dua dekade terakhir yang bersamaan dengan mulai munculnya Tiongkok di panggung internasional. Adanya sentimen publik akan ketergantungan Indonesia dengan utang dari Tiongkok tidak terlihat dari analisis dokumen (144 dokumen kerja sama dengan Tiongkok tidak mencakup dokumen perjanjian hutang sama sekali). Di lain pihak, dari 335 dokumen dengan Amerika Serikat, terdapat 81 dokumen yang merupakan dokumen perjanjian utang.

Tabel 2. Negara-negara Mitra Indonesia dalam Resolusi di Majelis Umum PBB

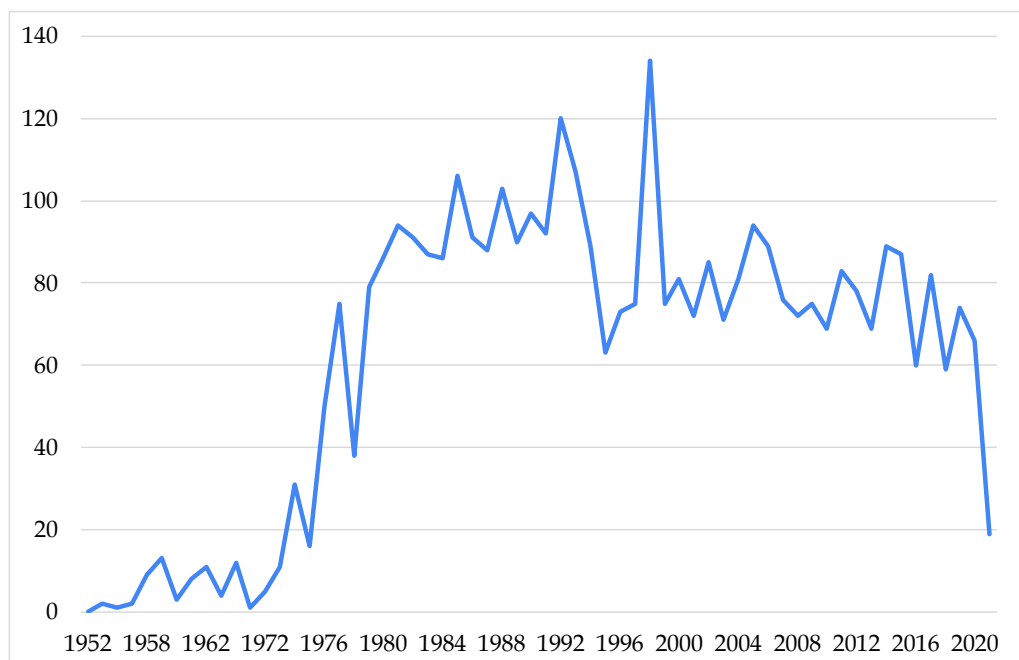
Negara	Identitas yang Diwakilkan	Kawasan
Afghanistan	Negara Muslim	Asia Selatan/Tengah
Afrika Selatan	Anggota G20, Negara Afrika	Afrika
Amerika Serikat	Anggota G20, Anggota G7	Amerika Utara
Arab Saudi	Anggota G20, Negara Muslim	Timur Tengah
Arab Saudi	Anggota G20, Negara Muslim	Timur Tengah
Argentina	Anggota G20, Negara Amerika Latin	Amerika Selatan
Australia	Anggota G20, Negara Pasifik	Oseania
Belanda	Komplemen Negara Eropa	Eropa
Brasil	Anggota G20, Negara Amerika Latin	Amerika Selatan
Tiongkok	Anggota G20	Asia Timur
Filipina	Anggota ASEAN	Asia Tenggara
Ghana	Negara Afrika	Afrika
India	Anggota G20	Asia Selatan
Inggris	Anggota G20, Anggota G7	Eropa
Irak	Negara Muslim	Timur Tengah
Iran	Negara Muslim	Timur Tengah
Israel	Negara Timur Tengah	Timur Tengah
Italia	Anggota G20, Anggota G7	Eropa
Jepang	Anggota G20, Anggota G7	Asia Timur
Jerman	Anggota G20, Anggota G7	Eropa
Kanada	Anggota G20, Anggota G7	Amerika Utara
Korea Selatan	Anggota G20	Asia Timur
Korea Utara	Negara Komunis	Asia Timur
Libya	Negara Muslim	Afrika/Timur Tengah
Malaysia	Anggota ASEAN, Negara Muslim	Asia Tenggara
Meksiko	Anggota G20, Negara Amerika Latin	Amerika Utara
Mesir	Negara Muslim	Afrika/Timur Tengah
Myanmar	Anggota ASEAN/Asia Tenggara	Asia Tenggara
Pakistan	Negara Muslim	Asia Selatan
Papua Nugini	Negara Pasifik	Oseania
Prancis	Anggota G20, Anggota G7	Eropa
Qatar	Negara Muslim	Timur Tengah
Rusia	Anggota G20	Eropa
Selandia Baru	Negara Pasifik	Oseania
Singapura	Anggota ASEAN/Asia Tenggara	Asia Tenggara
Spanyol	Negara Uni Eropa	Eropa
Suriah	Negara Muslim	Timur Tengah
Swedia	Negara Skandinavia, Komplemen Negara Eropa	Eropa
Thailand	Anggota ASEAN/Asia Tenggara	Asia Tenggara
Timor Leste	Negara Asia Tenggara	Asia Tenggara
Turki	Anggota G20, Negara Muslim	Eropa/Timur Tengah
Ukraina	Negara Eropa Timur	Eropa
Uni Emirat Arab	Negara Muslim	Timur Tengah
Vanuatu	Negara Pasifik	Oseania
Vietnam	Anggota ASEAN/Asia Tenggara, Negara Komunis	Asia Tenggara

Keterlibatan Indonesia di forum internasional juga diukur melalui dukungan Indonesia dalam resolusi yang ada di Majelis Umum PBB. Tim peneliti memilih beberapa negara mitra di PBB untuk menjadi mengidentifikasi aktifnya Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di dunia. Negara-negara mitra tersebut adalah: Afghanistan, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Mesir, Prancis, Jerman, Ghana, India, Iran, Irak, Israel, Italia,

Jepang, Libya, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Korea Utara, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Suriah, Thailand, Timor Leste, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Vanuatu, dan Vietnam.

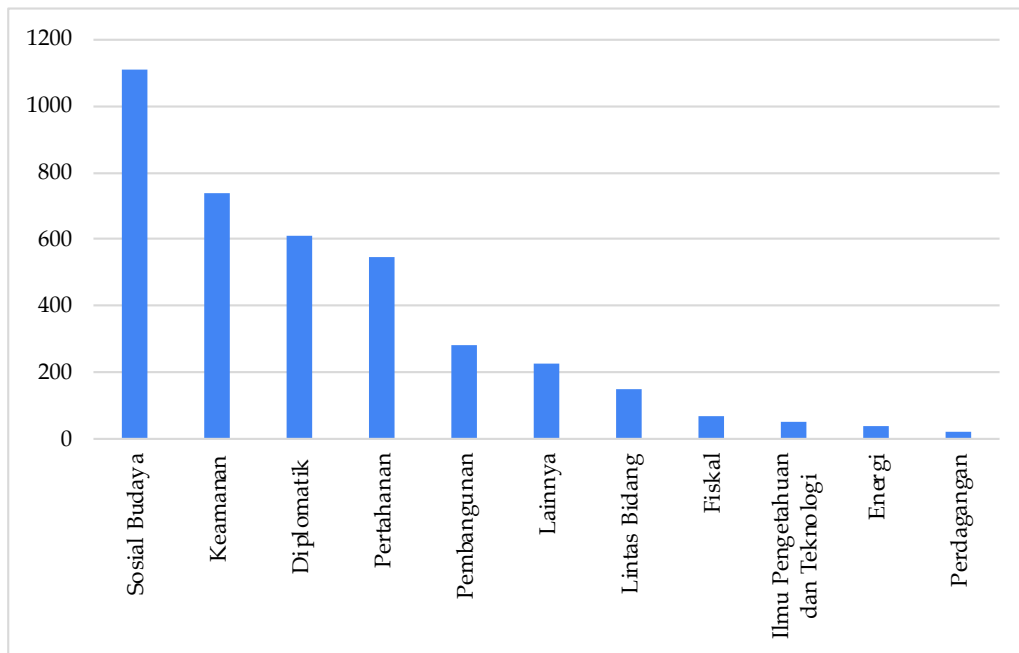
Ada beberapa identitas negara yang diwakili oleh pilihan ini dan satu negara dapat mewakili lebih dari satu identitas. Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Prancis, dan Rusia adalah anggota forum G20. Spanyol merupakan komplemen negara-negara Eropa lain dalam daftar tersebut. Afghanistan, Mesir, Iran, Irak, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, dan Uni Emirat Arab menjadi sampel negara-negara dengan populasi penduduk Muslim yang besar. Dengan Israel, mereka juga menjadi negara di kawasan Timur Tengah. Argentina dan Brasil mewakili negara-negara Amerika Latin. Negara-negara anggota di Asia Tenggara diwakili oleh Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Vietnam juga mewakili negara komunis dengan Korea Utara. Sedangkan Papua Nugini dan Vanuatu mewakili negara-negara Pasifik. Swedia mewakili negara Skandinavia. Ukraina mewakili negara Eropa Timur bersama dengan Rusia.

Bagan 6. Perkembangan Jumlah Resolusi dengan Partisipasi Indonesia di Majelis Umum PBB Tahun 1952 - 2021



Dari 3.849 buah dukungan Indonesia terhadap resolusi di Majelis Umum PBB, terlihat Indonesia paling aktif pada tahun 1998 dengan 134 dukungan, bersinggungan dengan mulainya Reformasi. Indonesia paling tidak aktif pada tahun 1952, 1955, dan 1956 di mana Indonesia hanya membuat satu dukungan tiap tahunnya.

Bagan 7. Jumlah Resolusi Indonesia di Majelis Umum PBB



Tim penulis juga membagi resolusi yang Indonesia dukung menjadi beberapa kategori, yaitu Diplomatik, Energi, Fiskal, Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Keamanan, Lainnya, Lintas Bidang, Pembangunan, Perdagangan, Pertahanan, dan Sosial Budaya. Indonesia paling banyak memberi dukungan dalam topik Sosial Budaya, dengan jumlah hampir sepertiga dari total dukungan yang Indonesia berikan. Keamanan menempati tempat kedua dengan jumlah 737 dari 3.849 dukungan total. Indonesia paling sedikit memberi dukungan dalam bidang perdagangan dengan total 23 dukungan.

Berdasarkan paparan statistik deskriptif mengenai misi perdamaian, traktat internasional, dan dataset dukungan Indonesia di Majelis Umum, ditambah dengan landasan teoretis dan konseptual mengenai determinan-determinan politik luar negeri, penelitian ini melakukan analisis statistik untuk mencari korelasi antara determinan-determinan politik luar negeri yang berasal dari situasi politik dan ekonomi domestik dengan pengejawantahan politik luar negeri berupa misi perdamaian, traktat internasional, dan dukungan Indonesia di Majelis Umum PBB.

Penelitian ini membuat model sederhana untuk melihat korelasi antara tiga variabel dependen yang mewakili pengejawantahan politik luar negeri dengan sejumlah faktor politik dan ekonomi domestik. Model tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Variabel Dependen (Keaktifan Polugri RI: [Traktat, Resolusi PBB, UNPKO])} = \\ \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Politik Domestik (polyarchy)} + \beta_2 \cdot \text{Politik Domestik (Participatory Democracy)} + \\ \beta_3 \cdot \text{Politik Domestik (Deliberative Democracy)} + \beta_4 \cdot \text{LogGDP} + \beta_5 \cdot \text{Trade Dependency} + \varepsilon \end{aligned}$$

Berdasarkan model di atas, penelitian ini melakukan tiga analisis regresi terhadap masing-masing variabel dependen. Jenis regresi yang digunakan adalah regresi OLS dengan penggunaan fungsi seri waktu (*time series*). Fungsi seri waktu digunakan karena data yang dikumpulkan diurutkan dari tahun 1945 sampai dengan 2020, dengan observasi lengkap per regresi berkisar antara 31 sampai dengan 71. Dalam penelitian ini, tim peneliti menggunakan variabel dependen dengan bentuk diskret maupun kategorial (skala), namun kami menyajikan hanya hasil analisis regresi dengan variabel dependen diskrit karena tidak ada perbedaan signifikan antara temuan yang didapatkan. Khusus untuk PDB, kami menggunakan skala logaritmik (log) untuk menormalisasi kisaran angka PDB Indonesia yang memiliki variasi sangat besar. Kami juga menggunakan skor dari *Varieties of Democracy* (V-Dem) sebagai tolok ukur.

Pada regresi pertama (lihat Tabel 4.3), tim peneliti menemukan bahwa variabel independen yang disiapkan tidak ada satu pun yang berkorelasi signifikan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang didukung oleh Indonesia. Selain itu, nilai *R-squared* yang didapatkan juga tidak ada yang di atas 0.6, yang berarti data yang tersedia tidak sesuai dengan model regresi.

Tabel 3. Regresi dengan Total Resolusi Majelis Umum PBB yang didukung Indonesia sebagai variabel dependen

VARIABEL	Total Resolusi Majelis Umum PBB yang didukung Indonesia (per tahun)					
Skor <i>Polyarchy</i>	8.141					-75.45
	(-19.82)					(-247.4)
Skor <i>Participatory Democracy</i>		13.41				357.3
		(-25.37)				(-319.9)
Skor <i>Liberal Democracy</i>			2.411			-218.1
			(-21.29)			(-331.3)
Log PDB Indonesia				0.453		-27.41
				(-4.049)		(-16.79)
Dependensi Perdagangan Indonesia					23.9	-18.13
					(-26.9)	(-44.63)
Konstanta	59.23***	59.70***	61.66***	74.66	67.25***	410.0*
	(-8.386)	(-6.349)	(-6.381)	(-45.1)	(-11.98)	(-202.1)
Observasi	71	71	71	54	31	31
R-squared	0.002	0.004	0	0	0.026	0.248

Robust standard errors di dalam kurung

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pada regresi kedua (lihat tabel 4.4), ditemukan bahwa seluruh variabel independen berkorelasi signifikan dengan jumlah traktat internasional Indonesia per tahun. Hanya saja, autokorelasi mungkin merupakan sebab utamanya karena tren jumlah traktat internasional Indonesia dengan skor-skor demokrasi, log PDB, serta dependensi perdagangan Indonesia

selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada regresi multivariat (nomor 6 di tabel 4.4.), ditemukan bahwa di antara seluruh variabel, yang berkorelasi signifikan dengan jumlah traktat internasional Indonesia hanyalah log PDB Indonesia. Korelasi yang didapatkan sangat signifikan, dengan *p-value* di bawah 0.01, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara pendapatan domestik bruto Indonesia dengan jumlah traktat internasional yang ditandatangani oleh Indonesia. Model regresi multivariat juga kuat, dengan *R-squared* 0.653 menunjukkan bahwa 65.3% data sesuai dengan model regresi. Koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 91.78, yang berarti bertambahnya 1% PDB Indonesia berarti bertambah pula traktat yang ditandatangani Indonesia sebesar 0.9 buah atau kurang lebih 1 traktat. Dengan demikian, dapat ditarik temuan bahwa peningkatan PDB Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan jumlah traktat.

Tabel 4. Regresi Dengan Jumlah Traktat Internasional Indonesia sebagai Variabel Dependen

VARIABEL	Jumlah traktat internasional Indonesia (per tahun)					
Skor <i>Polyarchy</i>	104.2***					-169.6
	(-18.02)					(-460.4)
Skor <i>Participatory Democracy</i>		147.3***				73.02
		(-21.82)				(-595.3)
Skor <i>Liberal Democracy</i>			113.8***			95.87
			(-19.15)			(-616.5)
Log PDB Indonesia				43.39***		91.78***
				(-5.235)		(-31.25)
Dependensi Perdagangan Indonesia					-231.1***	13.82
					(-61.18)	(-83.06)
Konstanta	9.636	20.20***	22.18***	-422.1***	178.1***	-958.1**
	(-7.622)	(-5.46)	(-5.74)	(-58.31)	(-27.25)	(-376.1)
Observasi	71	71	71	54	31	31
R-Squared	0.326	0.398	0.339	0.569	0.33	0.653

Robust standard errors di dalam kurung

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Untuk memastikan bahwa korelasi antara kedua variabel juga signifikan seiring waktu, tim peneliti melakukan regresi bivariat antara jumlah traktat yang ditandatangani Indonesia per tahun dengan lag 1 tahun dan lag 2 tahun dari Log PDB Indonesia. Hasil regresi tersebut (lihat Tabel 4.5) menunjukkan bahwa korelasi yang signifikan antara kedua variabel tidak hanya berlaku dalam satu tahun saja, tetapi juga hingga 2 tahun ke belakang. Patut diperhatikan bahwa *R-squared* yang bernilai di atas 0.5 tetapi masih di bawah 0.6 menunjukkan reliabilitas yang cukup menggambarkan *fit* dari data ke model regresi.

Tabel 5. Regresi Bivariat Dengan Lag 1 Tahun dan Lag 2 Tahun Antara Jumlah Traktat Internasional Indonesia dengan Log PDB Indonesia

VARIABEL	Jumlah traktat internasional Indonesia (per tahun)		
Log PDB Indonesia	43.39***		
	(-5.235)		
Lag 1 Log PDB Indonesia		44.28***	
		(-5.299)	
Lag 2 Log PDB Indonesia			45.19***
			(-5.404)
Konstanta	-422.1***	-430.6***	-439.4***
	(-58.31)	(-58.93)	(-60)
Observasi	54	53	52
R-Squared	0.569	0.578	0.583

Robust standard errors di dalam kurung

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Regresi dengan variabel dependen terakhir berupa jumlah pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping Operation, UNPKO) yang dikirim oleh Indonesia (lihat tabel 4.6) menunjukkan pola yang sama dengan regresi sebelumnya, yakni korelasi yang signifikan pada regresi bivariat. Sekali lagi, regresi multivariat juga menemukan bahwa satu-satunya yang berkorelasi signifikan saat dibandingkan dengan variabel independen lain adalah log PDB Indonesia. Koefisien yang bernilai 3,018 dapat diterjemahkan sebagai berikut: peningkatan 1% PDB Indonesia berkaitan dengan penambahan 301.8 atau hampir 302 personel pasukan Indonesia di misi UNPKO. Model regresi multivariat ini pun sangat reliabel dengan skor *R-squared* 0.808, yang berarti 80.8% data dapat dijelaskan dengan model regresi. Dengan demikian, dapat ditarik temuan bahwa peningkatan PDB Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasukan yang dikirim untuk misi UNPKO.

Tabel 6. Regresi dengan Jumlah Pasukan UNPKO Indonesia sebagai Variabel Dependen

VARIABEL	Jumlah pasukan UNPKO Indonesia (per tahun)					
Skor <i>Polyarchy</i>	2,115***					-1,479
	(-495.9)					(-8,903)
Skor <i>Participatory Democracy</i>		2,845***				-2,703
		(-597.9)				(-11,512)
Skor <i>Liberal Democracy</i>			2,287***			2,312
			(-511.7)			(-11,922)
Log PDB Indonesia				1,626***		3,018***
				(-182.5)		(-604.3)
Dependensi Perdagangan Indonesia					-6,915***	14.37
					(-1,459)	(-1,606)
Konstanta	-130.9	96.33	132.1	-17,643***	4,048***	-33,050***
	(-238.3)	(-178.8)	(-181)	(-2,066)	(-649.6)	(-7,274)
Observasi	46	46	46	46	31	31
R-Squared	0.292	0.34	0.312	0.643	0.437	0.808

Robust standard errors di dalam kurung

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Seperti yang dilakukan sebelumnya, untuk memastikan bahwa korelasi antara kedua variabel juga signifikan seiring waktu, tim peneliti melakukan regresi bivariat antara jumlah pasukan UNPKO Indonesia per tahun dengan lag 1 tahun dan lag 2 tahun dari Log PDB Indonesia. Hasil regresi (lihat Tabel 4.7) menunjukkan bahwa korelasi yang signifikan antara kedua variabel tidak hanya berlaku dalam satu tahun saja, tetapi juga hingga 2 tahun ke belakang.

Tabel 7. Regresi Bivariat dengan Lag 1 Tahun Dan Lag 2 Tahun antara Jumlah Pasukan UNPKO Indonesia dengan Log PDB Indonesia

VARIABEL	Jumlah pasukan UNPKO Indonesia (per tahun)		
Log PDB Indonesia	1,626***		
	(-182.5)		
Lag 1 Log PDB Indonesia		1,591***	
		(-183.2)	
Lag 2 Log PDB Indonesia			1,515***
			(-186.5)
Konstanta	-17,643***	-17,186***	-16,268***
	(-2,066)	(-2,067)	(-2,098)
Observasi	46	46	46
R-Squared	0.643	0.632	0.6

Robust standard errors di dalam kurung

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Terakhir, tim peneliti juga mencari tahu korelasi antara pendapatan domestik bruto Indonesia dengan skor-skor indeks demokrasi yang ada di dalam data set V-Dem. Regresi multivariat yang dilakukan mencakup 5 variabel dependen (masing-masing skor V-Dem) dan 1 variabel independen (Log PDB Indonesia), dengan fungsi “mvreg” di Stata. Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh skor indeks demokrasi berkorelasi signifikan dengan koefisien positif, yang berarti semakin tinggi kualitas demokrasi Indonesia berkaitan dengan semakin tingginya pendapatan domestik bruto Indonesia. Hanya saja, di antara kelima indeks yang ditelaah, *R-squared* tertinggi ada pada model yang menggunakan skor *participatory democracy*, dengan nilai *R-squared* sebesar 0.579. Hal ini berarti kurang lebih 57.9% data dapat dijelaskan dengan model regresi. Dengan demikian, dapat ditarik temuan bahwa Indonesia sebaiknya meningkatkan skor demokrasi partisipatoris untuk meningkatkan ekonominya.

Tabel 8. Regresi antara Skor-Skor Indeks Demokrasi dengan Log PDB Indonesia

VARIABEL	<i>Polyarchy</i>	<i>Liberal Democracy</i>	<i>Participatory Democracy</i>	<i>Egalitarian Democracy</i>	<i>Deliberative Democracy</i>
Log PDB Indonesia	0.274***	0.265***	0.224***	0.187***	0.269***
	(-0.0342)	(-0.0322)	(-0.0265)	(-0.0227)	(-0.0359)
Konstanta	-2.658***	-2.703***	-2.288***	-1.823***	-2.673***
	(-0.381)	(-0.359)	(-0.296)	(-0.252)	(-0.4)
Observasi	54	54	54	54	54
R-Squared	0.552	0.565	0.579	0.567	0.519

Robust standard errors di dalam kurung

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Berdasarkan analisis terhadap data, baik dari segi statistik deskriptif, regresi bivariat, dan regresi multivariat, terdapat tiga temuan yang dapat disimpulkan. Pertama, secara umum Indonesia mencatatkan peningkatan luaran politik luar negeri setiap tahunnya berdasarkan grafik yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas. Setidaknya, terdapat dua variabel luaran politik luar negeri Indonesia, yakni jumlah traktat dan jumlah pasukan UNPKO. Kedua variabel ini kemudian dilihat memiliki korelasi positif yang signifikan dengan PDB Indonesia. Kedua, temuan yang didapatkan menjelaskan peningkatan partisipasi Indonesia di politik internasional berkaitan langsung dengan peningkatan PDB. Semakin besar PDB Indonesia, maka Indonesia dilihat semakin aktif dalam mengirim pasukan UNPKO dan mengeluarkan traktat. Ketiga, berdasarkan analisis regresi multivariat antara Log PDB Indonesia dengan skor-skor indeks demokrasi, ditemukan bahwa skor demokrasi partisipatoris adalah yang paling berkaitan dengan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya, dapat

disimpulkan bahwa baik keaktifan politik luar negeri Indonesia dalam hal kontribusi Indonesia pada pasukan UNPKO dan keterlibatan dalam traktat internasional dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik domestik, dengan peningkatan ekonomi dan kualitas demokrasi di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan keaktifan pelaksanaan politik luar negeri.

Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2045

Temuan-temuan penelitian sebelumnya menyarankan bahwa situasi lingkungan eksternal dan kondisi politik domestik membentuk secara signifikan pola pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Bab ini memaparkan bagaimana variabel-variabel tersebut dipergunakan untuk membangun skenario-skenario bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang. Sebelum menguraikan skenario-skenario tersebut bagian di bawah ini akan memaparkan asumsi dan dasar yang menjadi dasar pembangunan skenario tersebut.

Kondisi lingkungan eksternal yang diperhitungkan dalam pembuatan skenario adalah persaingan strategis antar negara-negara besar. Situasi ini, sebagaimana disarankan oleh kajian-kajian akademik terdahulu, adalah realitas politik internasional yang dilihat oleh para elite pengambil kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa.⁶⁵ Para elite tersebut menggambarkan bahwa dalam interaksinya dengan negara-negara besar, Indonesia bagaikan “gadis cantik” yang diperebutkan oleh para lelaki. Analogi gadis cantik (*pretty girl analogy*) ini menyarankan bahwa para elite melihat Indonesia menempati posisi khusus dan penting dalam politik internasional, sehingga menarik minat negara-negara besar untuk berinteraksi dengannya. Indonesia meyakini bahwa negara-negara besar (para lelaki) ingin mengambil manfaat sebesar-besarnya dari interaksinya dengan si gadis yang kecantikannya bersumber pada statusnya sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, letaknya yang amat strategis, dan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat besar.

Berdasarkan uraian ini, dalam memprediksi pola pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, penelitian ini pertama-tama mengasumsikan bahwa para elite pengambil kebijakan luar negeri di Indonesia terus melihat intensi tidak bersahabat (*hostile intention*) dari negara-negara besar. Persepsi tersebut lah yang akan menghambat Indonesia untuk mengambil tindakan mengimbangi kekuatan lawan (*balancing*) atau berkoalisi dengan musuh (*bandwagoning*) dalam manifestasi yang seutuhnya. Indonesia akan cenderung melakukan

⁶⁵ Weinstein, “Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Suharto”, 1976; Daniel Novotny, “Torn between America and China: Elite Perceptions and Indonesian Foreign Policy”, 2010.

hedging, yaitu mengombinasikan elemen-elemen penyusun dari kedua strategi tersebut untuk memaksimalkan usaha untuk mendapatkan keuntungan sekaligus mengelola risiko, yang terkandung dan muncul akibat pola hubungan asimetris antara Indonesia dan negara besar. Dalam hal ini, sinyal sistemis bagi Indonesia untuk melakukan *hedging* akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya rivalitas strategis negara besar.

Kecurigaan terhadap kekuatan-kekuatan besar tidak hanya ditemukan di antara kelompok elite, melainkan juga di tengah-tengah masyarakat umum, mengingat kompleksitas historis dan sosial-politik Indonesia sebagai negara bekas jajahan.⁶⁶ Kecurigaan tersebut menebal seiring dengan munculnya pandangan bahwa kekuatan-kekuatan tersebut berusaha mengambil manfaat dari perpecahan-perpecahan internal pada dekade-dekade awal setelah Proklamasi Kemerdekaan, dengan melakukan tindakan-tindakan subversif.⁶⁷ Hal ini kemudian semakin menguat setelah para penguasa atau elite politik berusaha memobilisasi kesadaran kebangsaan, yang di dalamnya terkandung sentimen anti-asing, sebagai salah satu alat untuk memperbesar legitimasi politik atau menggalang dukungan politik dari massa.⁶⁸

Atas dasar pemahaman ini, penelitian ini mengasumsikan pula bahwa isu hubungan Indonesia dengan negara-negara besar akan selalu berpotensi menjadi instrumen politik dalam dinamika perebutan kekuasaan dalam negeri. Pada konteks seperti inilah proposisi yang diajukan teori realisme neoklasik dalam Hubungan Internasional dapat dipahami. Menurut teori tersebut, dinamika lingkungan domestik adalah variabel yang memediasi (*intervening variable*) dampak kausal dari variabel sistemis terhadap pilihan-pilihan kebijakan negara. Dengan kata lain, situasi politik internal dapat memperkuat atau memperlemah sinyal-sinyal sistemis bagi Indonesia untuk melakukan *hedging*. Pertarungan yang kompetitif antara elite penguasa dan kelompok oposisi dalam memperebutkan kekuasaan menimbulkan kebutuhan agar penguasa melakukan *hedging*, sebab kedekatan kentara hanya dengan salah satu negara besar semata memberikan kesempatan kepada oposisi untuk menggalang sentimen kebangsaan demi memperluas dukungan. Di sisi lain, keberhasilan penguasa mengonsolidasikan kekuatan politik akan mengurangi urgensi bagi mereka untuk melakukan *hedging*, sebab potensi munculnya serangan politik telah lebih dulu ditekan dengan mengerdilkan kemampuan oposisi berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan.

Selain pada dua asumsi di atas, pembangunan skenario-skenario pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia 2045 juga berdasar pada temuan uji statistik pada bab sebelumnya terkait

⁶⁶ G. McT. Kahin, *Nasionalisme & Revolusi Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2013).

⁶⁷ A. R. Kahin & G. McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia* (New York: The New Press, 1995).

⁶⁸ E. Aspinall, "The New Nationalism in Indonesia," *Asia & the Pacific Policy Studies* 3 no. 1 (2015): 72-82.

hubungan kapabilitas ekonomi dan corak pelaksanaan kebijakan luar negeri. Temuan tersebut menyarankan bahwa peningkatan PDB Indonesia akan diikuti oleh manifestasi peran aktif dan kontribusi Indonesia dalam urusan-urusan internasional. Selain itu, sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, usaha mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatoris dapat berkontribusi secara positif terhadap kapabilitas ekonomi Indonesia. Temuan ini menyarankan bahwa pewujudan demokrasi partisipatoris turut memiliki dampak positif, walaupun dalam hubungan yang tidak langsung, terhadap pelaksanaan postur kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kontribusi dan peran aktif Indonesia dalam urusan-urusan internasional berpotensi akan meningkat apabila pemerintah berkomitmen meningkatkan kapabilitas ekonomi dan kualitas partisipasi aktor-aktor dalam demokrasi, yang artinya membuka ruang bagi dinamika perebutan kekuasaan yang kompetitif untuk terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, bagian ini memaparkan beberapa skenario atau pengaturan yang akan dihadapi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya di masa depan. Skenario-skenario tersebut dibangun atas kombinasi variasi tiga variabel: intensitas persaingan negara besar, tingkat kapabilitas ekonomi, dan tingkat demokrasi partisipatoris. Jika masing-masing variabel memiliki dua kategori, seperti tinggi-rendah dan peningkatan-penurunan, maka terdapat delapan skenario yang mungkin dihadapi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya di masa mendatang (lihat Tabel 9).

Tabel 9. Potensi Skenario Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2045

<p>A</p> <p>Rivalitas Rendah antar-Negara Besar Penurunan Ekonomi Demokrasi Partisipatoris</p> <p><i>Hedging Lemah, Tidak Aktif</i></p>	<p>B</p> <p>Rivalitas Tinggi antar-Negara Besar Ekspansi Ekonomi Demokrasi Prosedural</p> <p><i>Aktif, tetapi Berpihak</i></p>	<p>C</p> <p>Rivalitas Rendah antar-Negara Besar Ekspansi Ekonomi Demokrasi Partisipatoris</p> <p><i>Aktif Menciptakan Lingkup Pengaruh</i></p>
<p>D</p> <p>Rivalitas Rendah antar-Negara Besar Penurunan Ekonomi Demokrasi Prosedural</p> <p><i>Isolasionis</i></p>		<p>E</p> <p>Rivalitas Rendah antar-Negara Besar Ekspansi Ekonomi Demokrasi Prosedural</p> <p><i>Non-Blok, Aktif</i></p>
<p>F</p> <p>Rivalitas Tinggi antar-Negara Besar Penurunan Ekonomi Demokrasi Prosedural</p> <p><i>Revisionis</i></p>	<p>G</p> <p>Rivalitas Tinggi antar-Negara Besar Ekspansi Ekonomi Demokrasi Partisipatoris</p> <p><i>Hedging Kuat, Aktif</i></p>	<p>H</p> <p>Rivalitas Tinggi antar-Negara Besar Penurunan Ekonomi Demokrasi Partisipatoris</p> <p><i>Hedging Lemah</i></p>

Skenario Hedging Lemah dan Tidak Aktif

Skenario ini terjadi ketika persaingan antar negara-negara besar mewujud dalam intensitas yang rendah dan Indonesia, yang berkomitmen pada demokrasi yang sangat partisipatoris, mengalami penurunan kapabilitas ekonomi. Situasi lingkungan eksternal yang sedemikian tidak memberikan Indonesia sinyal untuk melakukan *hedging*. Namun demikian, kebutuhan *hedging* tetap muncul didorong kondisi persaingan elite politik di dalam negeri sebagai pewujudan demokrasi yang lebih partisipatoris. Dalam kompleksitas situasi seperti ini, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia akan lebih berfungsi sebagai instrumen penguasa untuk melayani kepentingan-kepentingan politiknya dalam menghadapi kelompok oposisi yang kuat. Dengan demikian, *hedging* akan cenderung muncul dengan intensitas yang lemah, diikuti dengan absennya pengambilan inisiatif atau terobosan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri sebagai dampak melemahnya perekonomian nasional.

Dalam sejarah Indonesia kontemporer, skenario ini pernah mewujud pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarnoputri. Patut diperhatikan bahwa pada masa kepemimpinan kedua presiden tersebut, yang sebetulnya yang terjadi bukanlah kerja sama murni antar-negara besar, melainkan sebuah momen unipolar Amerika Serikat. Tidak ada negara besar lain, baik Tiongkok maupun Rusia, yang berkonflik atau menentang kebijakan Amerika Serikat. Amerika Serikat relatif bebas dalam kebijakan luar negerinya, seperti invasi ke Afganistan dan Irak yang dilakukan tanpa ada mandat dari PBB. Dalam konteks domestik, rivalitas politik yang kental untuk perebutan kekuasaan terjadi dengan sangat intensif. Presiden Abdurrahman Wahid bahkan dimakzulkan oleh DPR sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, ekonomi Indonesia belum juga bangkit secara signifikan setelah terpaan badai Krisis Finansial Asia 1997.

Kombinasi situasi eksternal dan internal, serta kondisi perekonomian Indonesia memunculkan pelaksanaan kebijakan luar negeri dengan pola *hedging* yang lemah dan cenderung tidak aktif. Intensi Indonesia melakukan *hedging* ditunjukkan dengan visi Presiden Abdurrahman Wahid menginisiasi poros Jakarta-Beijing-New Delhi, demi mengimbangi dominasi Amerika Serikat. Namun demikian, visi tersebut tidak mendapat sambutan baik dari Tiongkok, maupun India, dan kemudian kehilangan relevansi di tengah momen unipolaritas Amerika Serikat. Visi tersebut pun menguap begitu saja di tengah ketidakberhasilan Presiden Abdurrahman Wahid melakukan konsolidasi kekuatan politik di dalam negeri. Pola *hedging* yang lemah masih bertahan di era Presiden Megawati Sukarnoputri, yang berusaha mendekati Amerika Serikat di tengah berkibarnya *Global War on Terror* setelah peristiwa 11 September 2001 sambil terus sekedar mengirimkan sinyal-sinyal

kepada Tiongkok untuk memperkuat kerja sama bilateral. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang amat signifikan diraih Indonesia dalam menyeimbangkan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, yang semata menunjukkan bahwa *hedging* dilakukan hanya pada tataran retorika belaka.

Skenario Aktif, tetapi Berpihak

Skenario ini terjadi ketika persaingan antar negara-negara besar menghadirkan konflik dengan intensitas tinggi, sementara struktur politik domestik Indonesia diwarnai dengan pelaksanaan demokrasi prosedural semata dan performa ekonomi nasional menunjukkan peningkatan. Dalam situasi ini, persaingan negara besar yang memanas seharusnya memberikan rasionalisasi untuk penerapan *hedging*. Namun, rivalitas menuju kekuasaan yang tidak kompetitif mengurangi dorongan dari dalam negeri untuk melakukannya. Pemimpin mendapat kebebasan untuk memiliki kedekatan dengan blok mana pun seiring dengan upayanya membatasi opini publik domestik. Peningkatan performa ekonomi dalam skenario ini juga membuka jalan untuk mengambil langkah kebijakan luar negeri yang lebih aktif, termasuk dalam menjangkau mitra-mitra non-tradisional dan meningkatkan kontribusi Indonesia di tingkat global dan regional. Adapun kondisi ekonomi yang stabil akan membuat kebijakan luar negeri diarahkan untuk menjaga status quo alih-alih menjadi revisionis.

Indonesia pernah mengalami kondisi serupa pada pemerintahan Orde Baru Suharto pada dekade 1970-an dan 1980-an. Saat itu, Jakarta menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperluas lingkup pengaruhnya masing-masing. Namun, keberhasilan rezim Orde Baru mengonsolidasikan kekuatan politik menihilkan dorongan dari dalam negeri untuk melakukan *hedging*. Hal ini yang kemudian tampak dalam posisi Indonesia yang secara geopolitik lebih dekat ke Blok Barat, suatu tindakan pragmatis yang diambil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri terkait pembangunan ekonomi nasional. Buah dari keberhasilan melaksanakan pembangunan ekonomi pun tampak dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin aktif pada era 1980-an dan awal 1990-an. Pada periode ini, wujud keaktifan nyata Indonesia terlihat dalam kepemimpinannya di GNB tahun 1992-1995 yang sekaligus memberikannya kesempatan untuk menjadi tuan rumah KTT GNB sebagai upaya mengkonsolidasikan kembali negara-negara non-blok pasca-Perang Dingin.

Skenario Otonomi Strategis Indonesia di Dunia Internasional

Skenario ini terjadi ketika situasi eksternal ditandai dengan persaingan negara-negara besar yang tidak kompetitif, sementara di lingkungan domestik terjadi perebutan kekuasaan yang kompetitif, di tengah ekspansi perekonomian nasional. Dalam situasi tersebut, Indonesia

akan melakukan *hedging* walaupun akan mewujud secara lemah, karena kebutuhan menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan negara-negara besar hanya muncul dari dalam negeri. Namun demikian, Indonesia akan terdorong meningkatkan keaktifan dan kontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah internasional, dengan dukungan kapabilitas ekonomi yang sangat amat memadai.

Skenario ini menjadi salah satu skenario yang ideal bagi Indonesia untuk dapat mengaplikasikan prinsip bebas-aktif. Rivalitas yang tidak kompetitif antar negara-negara besar membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya sendiri, melampaui kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia dapat memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan peran regionalisme dan multilateralisme. Indonesia dapat mendukung usaha-usaha menaikkan derajat ketergantungan negara-negara anggota terhadap forum-forum tersebut atau mendorong terciptanya mekanisme kerja sama yang berlandaskan aturan (*rule-based*). Apabila skenario ini terbentuk, Indonesia diharapkan mengambil peran-peran kepemimpinan di badan-badan PBB, mendorong sentralitas ASEAN, meningkatkan peran kepemimpinan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, memanfaatkan secara maksimal solidaritas negara-negara Muslim, dan mengambil manfaat lebih besar dari partisipasinya dalam G20.

Dengan otonomi strategis yang dimiliki Indonesia pada skenario ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan lingkup pengaruhnya di tingkat internasional. Di tingkat Kawasan Asia Tenggara, Indonesia dapat meningkatkan keterlibatannya sebagai pemimpin *de facto* ASEAN. Sementara itu, Indonesia juga dapat mengambil posisi kepemimpinan di antara negara-negara berkembang, khususnya melalui solidaritas negara Bagian Dunia Selatan. Indonesia dapat memelopori inisiatif dalam berbagai macam isu—seperti pembangunan, lingkungan, perdamaian, kesetaraan gender, konektivitas maritim, dan masih banyak lagi—dengan mengangkat perspektif kekuatan menengah yang belum terlalu banyak diangkat di forum-forum internasional. Dengan begitu, kepemimpinan Indonesia di level internasional dapat menyediakan perspektif yang segar dan tepat guna bagi negara-negara berkembang di komunitas internasional.

Skenario Isolasionis

Skenario ini terjadi ketika situasi eksternal ditandai dengan persaingan negara-negara besar yang tidak kompetitif, sementara kondisi perekonomian Indonesia memburuk dan pemerintahan dijalankan secara otoriter. Di bawah kondisi ini, *hedging* bukan menjadi pilihan yang bijaksana. Kehadiran pemerintahan yang otoriter semakin menihilkan dorongan untuk melakukan *hedging* atau mengarahkan kebijakan luar negeri pada tindakan revisionis,

meskipun secara praktis, kondisi perekonomian dalam negeri yang melemah memberi kesempatan bagi Indonesia untuk bersikap revisionis terhadap tatanan global. Melemahnya perekonomian nasional juga membatasi manuver kebijakan luar negeri Indonesia. Akibatnya, dalam situasi seperti ini, kebijakan luar negeri Indonesia akan relatif stagnan, isolasionis, dan berorientasi ke dalam (*inward-looking*).

Secara historis, belum ada praktik yang dapat menggambarkan skenario ini secara utuh. Kemiripan dari segi kondisi ekonomi dan politik domestik mungkin dapat terlihat pada era Demokrasi Terpimpin di awal tahun 1960-an, ketika kelemahan ekonomi dan politik otoriter mendorong arah kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi revisionis. Hal ini sekaligus dijadikan upaya menarik simpati Uni Soviet dan Tiongkok untuk mendukung pembangunan dalam negeri. Meski demikian, hal yang membedakan pada saat itu adalah persaingan intensif dari negara-negara besar yang kemudian turut mendorong kebijakan berorientasi ke luar Indonesia melalui konsepsi NEFO.

Skenario Non-Blok dan Aktif

Skenario ini terjadi ketika situasi eksternal ditandai dengan persaingan negara-negara besar yang tidak kompetitif, adanya peningkatan ekonomi Indonesia, dan situasi politik domestik yang berbasis pada praktik otoriter. Dalam situasi ini, *hedging* tidak diperlukan karena tidak dibutuhkan dalam konteks politik global, tidak diperlukan sebagai retorika politik domestik, dan tidak diperlukan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Dalam situasi ini, Indonesia dapat melakukan kebijakan yang tidak melibatkan negara besar seperti non blok dan juga dapat lebih aktif dalam melaksanakan terobosan-terobosan baru untuk semakin meningkatkan kapasitas ekonomi. Ketiadaan persaingan politik domestik juga berperan dalam memastikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak akan berubah dalam waktu dekat akibat perubahan susunan politisi dan ideologi dalam pemerintahan.

Dalam sejarah Indonesia kontemporer, skenario ini pernah terwujud pada periode pemerintahan Presiden Suharto pasca-Perang Dingin hingga sebelum Krisis Moneter Asia terjadi, atau sekitar tahun 1991-1996. Situasi politik internasional yang tidak bernuansa konflik antara negara besar, politik domestik yang cenderung stabil (di bawah sistem otoriter Orde Baru) dan ekonomi Indonesia yang relatif meningkat membuat Indonesia dapat mengejawantahkan sejumlah kebijakan luar negeri yang berbentuk terobosan baru. Kebijakan tersebut antara lain meliputi pencetusan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), pembubaran *Intergovernmental Group on Indonesia* (IGGI), dan pembentukan *Consultative Group on Indonesia* (CGI) pasca-Pembantaian Santa Cruz.

Dengan ketiadaan rivalitas antara negara besar, Indonesia tidak pula memiliki kebutuhan untuk *hedging*. Situasi ekonomi yang meningkat dan bentuk politik domestik yang otoriter juga mengurangi kepentingan untuk menjual retorika bombastis politik internasional untuk audiens domestik. Dalam skenario ini, Indonesia dapat lebih aktif dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Hanya saja, karena ketiadaan persaingan antara negara besar, keaktifan tersebut tidak dapat memiliki dampak yang signifikan untuk mengambil hati atau mendekati negara-negara besar yang memang sedang tidak mencari aliansi atau pendukung. Dengan demikian, Indonesia akan cenderung lebih independen dan tidak berpihak dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Skenario ini juga akan semakin mengizinkan diambilnya langkah-langkah yang lebih pragmatis dalam politik internasional.

Skenario Revisionis dan Aktif

Skenario ini terjadi ketika negara besar berkonflik atau memiliki intensitas persaingan yang tinggi, performa ekonomi Indonesia menurun, dan situasi politik domestik berbasis pada praktik otoriter. Dalam situasi politik internasional yang bernuansa konflik antara negara besar, Indonesia secara ideal seharusnya melakukan tindakan *hedging* agar mendapatkan sumber daya dari kedua belah pihak yang bertikai tanpa harus berpihak ke salah satunya. Hanya saja, dengan politik domestik yang otoriter serta diwarnai oleh penurunan ekonomi, kebijakan luar negeri yang diambil akan cenderung berbentuk upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan efek "*rallying around the flag*" atau peningkatan rasa nasionalisme secara tinggi dan massal.

Dalam sejarah Indonesia kontemporer, skenario ini pernah terwujud pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Sukarno. Pada periode tersebut, rivalitas negara besar dalam konteks Perang Dingin sedang berada di titik tertinggi. Kedua negara berusaha untuk menarik Indonesia ke pihak mereka. Di satu sisi, Amerika Serikat memutuskan untuk membantu integrasi Papua ke Indonesia lewat PBB. Di sisi lain, Uni Soviet memutuskan untuk menjual dan membagi teknologi persenjataan ke Indonesia. Hanya saja, kondisi ekonomi yang mengalami krisis akibat kesalahan kebijakan ekonomi domestik, ditambah dengan situasi otoriter yang terpusat di Sukarno, mengakibatkan Indonesia memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk mempertahankan kekuasaan Sukarno tanpa memperbaiki ekonomi. Kebijakan-kebijakan seperti konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura, keluarnya Indonesia dari PBB, serta propaganda anti neokolonialisme dan neoimperialisme lebih berperan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mendukung kepemimpinan dan popularitas Sukarno.

Adanya persaingan antara negara besar seharusnya mendorong Indonesia untuk melakukan kebijakan *hedging*. Hanya saja, kondisi politik domestik yang otoriter di tengah situasi ekonomi menurun cenderung menihilkan kebutuhan untuk *hedging*, karena fokus utama adalah untuk mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang dianggap populis, termasuk dalam konteks kebijakan luar negeri. Kondisi ekonomi yang menurun menjadikan kebijakan luar negeri yang revisionis, konfrontatif, dan mampu menaikkan rasa nasionalisme secara instan sebagai pilihan utama untuk mengalihkan perhatian publik. Indonesia akan semakin aktif dalam melakukan kebijakan-kebijakan tersebut selama masih berguna untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu ekonomi domestik.

Skenario Hedging sebagai Strategi Utama Politik Luar Negeri

Skenario ini terjadi ketika Indonesia berada di dalam lingkungan internasional yang sarat dengan kompetisi negara besar. Keaktifan Indonesia di komunitas internasional tidak akan memberikan keuntungan yang maksimal karena hubungan internasional akan terfokus ke dalam pertarungan lingkup pengaruh di antara negara besar. Sesuai dengan prinsip dari kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas-aktif,” Indonesia secara historis akan memanfaatkan opsi *hedging* untuk menyeimbangkan pengaruh dari negara besar di dalam politik luar negerinya. Hal ini juga berkaitan erat dengan kondisi politik domestik Indonesia yang memiliki tingkat demokrasi partisipatoris yang tinggi, sehingga menimbulkan *check and balance* yang kuat dari konstituen politik di dalam negeri. Di samping itu, Indonesia yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi juga menjadi daya tarik bagi negara-negara besar untuk dipersuasi keberpihakannya, sebab Indonesia memiliki modalitas untuk menjadi aktor yang berpengaruh di dunia internasional.

Pada strategi *hedging*, Indonesia secara sadar dapat membuka kerja sama dengan kedua negara besar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya sambil tetap mendapatkan jaring pengaman dari status quo. Dalam persaingan negara besar, negara revisionis akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berusaha untuk merangkul negara-negara lain ke dalam hubungan bilateral. Saat ini, Tiongkok telah menginisiasi program BRI sejak tahun 2013 dan berusaha mempererat kerja sama dengan negara-negara di Asia dengan meningkatkan konektivitas geografisnya.⁶⁹ Selain itu, FDI Tiongkok di Indonesia juga terus meningkat selama 2015 hingga ke triwulan ke-3 2020, di mana Tiongkok menempati nilai FDI terbesar di Indonesia dengan 17,29 miliar dolar AS, dan

⁶⁹ Stephen Smith, "China's "Major Country Diplomacy," Foreign Policy Analysis, 17:2, 2021

diproyeksikan akan terus meningkat di masa depan.⁷⁰ Dari perkembangan tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama bilateral dengan Tiongkok sebagai kesempatan untuk keluar dari “jebakan negara kelas menengah.” Perlu diingat bahwa kenaikan perekonomian Tiongkok disertai dengan ketidakpastian di bidang keamanan, khususnya mengingat perilaku ofensif Tiongkok dalam mempertahankan klaim historisnya di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia dapat mendapatkan jarring pengaman (*safety net*) dengan tetap menjalin kerja sama di bidang keamanan dengan AS sebagai status quo, baik itu melalui kerja sama pembangunan kapasitas, pembagian informasi, industri militer, maupun latihan gabungan.

Oleh karena itu, bentuk *hedging* yang paling realistis untuk dilakukan di dalam skenario ini adalah “pragmatisme ekonomi,” di mana Indonesia melakukan kerja sama dengan kedua negara besar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, sambil melakukan pertimbangan pengaruh (*omni-enmeshment*). Indonesia melakukannya dengan mempertahankan komitmen-komitmennya pada kerja sama multilateral di tingkat regional dan internasional. Kebijakan ini dinilai sebagai strategi yang paling realistis, mengingat Indonesia perlu tetap berada dalam kondisi yang tidak berpihak, tetapi di saat bersamaan, juga dapat memanfaatkan persaingan negara besar untuk kepentingan negaranya.

Skenario *Hedging* sebagai Strategi Keberlangsungan Hidup Indonesia

Skenario ini memperlihatkan kombinasi antara faktor eksternal dengan persaingan negara besar yang kuat dan tingkat demokrasi partisipatoris yang tinggi di dalam negeri, namun disertai dengan penurunan dari segi ekonomi. Pada skenario ini, Indonesia perlu mempertahankan netralitasnya di tingkat internasional dengan melakukan *hedging*, meskipun daya tawar Indonesia terhadap negara besar akan melemah. Indonesia tetap menjadi bagian dari perebutan lingkup pengaruh kedua negara besar meskipun signifikansi Indonesia sebagai area kontestasi berkurang.

Beberapa strategi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia di dalam konteks skenario ini adalah 1) *dominance denial*, atau menetralkan pengaruh dari negara revisionis di tingkat domestik dengan melakukan pendekatan yang lebih intens dengan status quo, atau 2) melakukan *binding engagement* dengan negara revisionis, atau mengakomodir negara revisionis secara diplomatik tanpa memutuskan hubungan dengan negara status quo. Kedua

⁷⁰ Sri Noviyanti, “Mengupas Kerja sama Investasi Cina di Indonesia,” Kompas, <https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia> (Diakses pada 22 November 2021)

strategi tersebut mengakomodasi kepentingan Indonesia untuk tetap mempertahankan netralitasnya melalui *hedging* meskipun posisi tawarnya melemah.

Praktik historis dalam skenario ini terlihat pada era pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) ketika Indonesia tengah mengalami transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Keadaan dunia yang saat itu memasuki satu dekade berakhirnya Perang Dingin kembali menegang ketika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok memburuk. Sementara itu, pemerintahan demokratis yang baru di Indonesia masih merasakan dampak yang besar akibat krisis finansial Asia. Pada saat itu, Indonesia memperlihatkan *weak hedging* dengan upaya mendapat bantuan ekonomi dari AS dan IMF. Lemahnya posisi tawar Indonesia terlihat dari bagaimana tekanan AS dan Australia berujung pada persetujuan referendum di Timor Timur. Indonesia juga relatif menurunkan keaktifannya secara internasional dan regional karena fokusnya pada menangani pemulihan krisis dan kondisi politik internal yang belum stabil. Meskipun begitu, pengalaman krisis Indonesia kemudian dijadikan acuan untuk mencegah hal serupa, seperti melalui inisiatif Chiang Mai untuk mengurangi potensi ekonomi di Asia Tenggara.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Di tengah munculnya “Abad Asia” dalam hubungan internasional, Indonesia yang berhasil mengarungi proses transisi demokrasi dan menjamin pertumbuhan ekonomi telah menarik banyak perhatian dunia. Demi mengantisipasi babak baru munculnya Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan dunia, penelitian ini menelaah faktor-faktor apa saja yang secara dominan membentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Dari temuan-temuan itu, penelitian ini bermaksud membangun skenario-skenario yang mungkin akan dihadapi Indonesia di masa depan dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Hal ini dilakukan untuk menjamin manifestasi aspirasi Mohammad Hatta tentang posisi Indonesia sebagai subjek yang berdaya dalam merumuskan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah dinamika politik internasional ke depan, di mana Indonesia muncul sebagai kekuatan utama.

Penelitian ini menjelaskan pola pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dari kacamata teori realisme neoklasik, dengan melihat pengaruh faktor-faktor sistemis internasional dan dalam negeri Indonesia terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, transformasi kebijakan luar negeri suatu negara harus memperhitungkan dinamika situasi lingkungan domestik, sebagai variabel yang memediasi efek situasi lingkungan eksternal. Dengan kata lain, penelitian ini memandang bahwa Indonesia sebagai unit dalam sistem internasional

tidak hanya sekedar melaksanakan perintah-perintah sistemis, melainkan menerjemahkan perintah-perintah tersebut berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dalam negeri, sambil mempertimbangkan kapabilitas yang dimiliki, sebelum memformulasikan suatu kebijakan luar negeri.

Penelitian ini menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya profil internasional Indonesia, terdapat tren peningkatan partisipasi aktif Indonesia membina hubungan antar bangsa dan peningkatan kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebagaimana tampak dari hasil uji statistik, dua hal tersebut berkorelasi secara positif dengan tingkat PDB Indonesia. Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian ini memproyeksikan bahwa komitmen untuk terus menjamin pertumbuhan ekonomi atau bahkan mengekspansi perekonomian ke depan hanya akan diikuti oleh munculnya Indonesia sebagai aktor dalam politik internasional yang semakin aktif dan kontributif. Jika pemerintah Indonesia terus berkomitmen pada usaha menata dan memperkuat perekonomian nasional, maka pada 2045 Indonesia akan muncul sebagai kekuatan yang semakin diperhitungkan dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang aktif mendorong terobosan-terobosan baru dan berkontribusi pada usaha mengatasi permasalahan-permasalahan internasional.

Seiring dengan hal itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat PDB Indonesia juga berkorelasi positif dengan kualitas demokrasi Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas demokrasi Indonesia, semakin tinggi pula kekuatan ekonomi Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa kualitas demokrasi yang dimaksud, utamanya harus mewujudkan dalam karakter partisipatoris sistem politik yang terbentuk. Dalam hal ini, komitmen pada demokrasi yang lebih partisipatoris tidak hanya mewujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum, melainkan juga dalam partisipasi aktif warga dalam seluruh proses politik. Dalam demokrasi dengan karakteristik yang sedemikian, persaingan dalam perebutan kekuasaan tentu terjamin, melalui proses-proses baik yang sifatnya elektoral, maupun non-elektoral. Dengan demikian, komitmen Indonesia pada 2045 untuk memastikan bahwa persaingan politik yang kompetitif tetap terjadi dalam konteks demokrasi yang lebih partisipatoris berpotensi mendorong pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif dan berkontribusi pada urusan-urusan internasional.

Perlu dicatat bahwa komitmen terhadap demokrasi yang partisipatoris akan memunculkan kebutuhan bagi Indonesia untuk melakukan *hedging*. Sepanjang sejarah, dinamika politik domestik Indonesia tidak pernah sama sekali terlepas dari pelaksanaan hubungan luar negeri. Bahkan, isu hubungan luar negeri sering kali menjadi instrumen untuk mengonsolidasikan kekuatan aktor-aktor politik nasional dalam konteks perebutan kekuasaan. Hal ini yang akan

mendorong pemerintah untuk terus memastikan bahwa terdapat keseimbangan dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara besar, dalam hal ini Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedekatan yang kentara dan signifikan kepada salah satu dari kekuatan besar tersebut hanya akan membuat kelompok yang berkuasa menjadi rawan terhadap serangan politik yang pada akhirnya akan menggerus dukungan politik bagi mereka. Kebutuhan *hedging* bagi Indonesia yang mempertahankan komitmen terhadap demokrasi partisipatoris akan semakin nyata, mengingat konteks Indonesia sebagai negara bekas jajahan, yang masyarakatnya secara umum menyimpan kecurigaan terhadap kekuatan-kekuatan besar dari luar.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa harapan bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi maju dengan komitmen kuat pada demokrasi yang partisipatoris pada 2045 mengandung harapan atas pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif dengan corak *hedging*. Dengan kata lain, penelitian ini menekankan bahwa Indonesia perlu mempertahankan komitmen terhadap prinsip bebas-aktif dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Namun, patut diingat bahwa pendekatan Indonesia dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif pada 2045 tentu akan juga bergantung pada bagaimana dinamika lingkungan eksternal yang terbentuk.

Terdapat dua skenario yang mungkin terjadi terkait persaingan strategis negara-negara besar pada 2045. Skenario yang pertama terjadi ketika hubungan antara negara-negara besar mewujud dalam nuansa persaingan strategis yang tidak kompetitif. Berhadapan dengan situasi tersebut, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia perlu didorong untuk memperluas lingkup pengaruh Indonesia dengan meningkatkan komitmen terhadap kerangka regional dan multilateral serta mengambil peran-peran kepemimpinan dalam menggalang solidaritas antar sesama negara berkembang. Indonesia perlu memanfaatkan lingkungan eksternal yang sedemikian dan ekspansi kekuatan ekonomi untuk membangun profil internasional, sebagai kekuatan baru yang tengah muncul dan perlu diperhitungkan.

Skenario yang kedua terjadi ketika hubungan antar negara-negara besar mewujud dalam nuansa persaingan strategis yang amat sangat kompetitif. Berhadapan dengan situasi tersebut, Indonesia sesungguhnya tidak punya ruang bermanuver yang luas untuk memperluas lingkup pengaruhnya. Di lain pihak, kondisi lingkungan eksternal yang sedemikian relevan dengan dorongan dari lingkungan domestik Indonesia untuk melakukan *hedging*. Indonesia dengan demikian perlu memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan *strong hedging* kepada negara-negara besar. Indonesia perlu memanfaatkan hubungannya

dengan negara-negara besar untuk terus meningkatkan kapabilitas negara, demi posisi tawar yang lebih baik dalam hubungannya dengan negara-negara besar tersebut pasca-2045.

Menghadapi kedua skenario di atas, pelaksanaan kebijakan luar negeri pada dasarnya sama-sama perlu diarahkan untuk memperluas ruang bagi Indonesia untuk bermanuver. Perbedaan, namun demikian, terdapat pilihan strategi. Pada skenario yang pertama, usaha untuk meningkatkan posisi tawar bagi Indonesia pasca-2045 dilakukan dengan meningkatkan lingkup pengaruh. Di lain pihak, pada skenario kedua, Indonesia harus berusaha meningkatkan posisi tawar pasca-2045 dengan cara meningkatkan kapabilitas. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa komitmen tinggi menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan negara-negara besar dapat didedikasikan seutuhnya bagi usaha memperkuat kapabilitas negara.

Mempertimbangkan skenario-skenario yang dapat dialami oleh Indonesia pada tahun 2045, pemerintah perlu menyusun strategi untuk menghasilkan kebijakan luar negeri yang optimal. Skenario ideal yang patut untuk dijalani oleh Indonesia pada tahun 2045 menempatkan negara ini sebagai negara kuat yang dapat mempertahankan kemandirian dan keaktifan di level internasional. Indonesia pada tahun tersebut juga sebaiknya dapat memosisikan dirinya dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas-aktif. Kemandirian politik luar negeri Indonesia hanya dapat dicapai ketika negara ini berada di dalam posisi yang kuat secara ekonomi dan memiliki proses demokrasi yang berimbang dan berkualitas di level domestik.

Terdapat dua rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh penelitian ini. Pertama, meningkatkan komitmen pada multilateralisme di level regional dan global, utamanya yang berbasis pada negara-negara berkembang. Berdasarkan analisis historis dan kuantitatif terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa komitmen pada multilateralisme, baik di level regional maupun global, dan keaktifan Indonesia di kancah internasional berkorelasi signifikan dengan semakin meningkatnya ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, seraya memperkuat upaya domestik untuk memperkuat basis perekonomian Indonesia, pemerintah juga diharapkan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara sahabat baik di kawasan Asia-Pasifik maupun di level global secara umum. Penguatan multilateralisme, terutama yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi, di level internasional diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kapabilitas finansial dan kemakmuran Indonesia. Selain itu, semakin bertambahnya komitmen Indonesia pada multilateralisme juga dapat menjadi landasan penguatan lingkup pengaruh Indonesia terutama pada negara-negara berkembang. Hal ini dapat mencegah Indonesia untuk terjebak

dalam pertentangan antar negara besar di masa mendatang dengan membentuk koalisi alternatif antara negara-negara berkembang.

Kedua, meningkatkan tingkat demokrasi partisipatoris di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan signifikansi tingkat partisipasi demokrasi yang tinggi dalam menentukan kemandirian politik luar negeri Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam politik akan menciptakan keseimbangan dan netralitas dalam pengambilan kebijakan luar negeri, sehingga Indonesia dapat terus berpegangan pada prinsip bebas-aktif. Sambil tetap mempertahankan sistem *check and balance* melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pemerintah Indonesia dapat membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Peningkatan partisipasi demokrasi dapat dipraktikkan dengan menciptakan sebuah platform bagi elemen-elemen masyarakat yang relevan (masyarakat sipil, LSM, media, pihak swasta, akademisi, dll.) untuk menyuarakan pendapatnya secara aman dan terbuka mengenai isu yang relevan dengan keahlian masing-masing. Proses ini juga perlu didampingi dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, sehingga publik mengetahui konteks dari perdebatan di dalam kebijakan tertentu. Dalam konteks skenario 2045, *check and balance* yang kuat dari Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; serta keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan luar negeri akan menciptakan posisi politik yang mandiri, terlepas dari dinamika politik di level internasional.

Tentang Laboratorium Indonesia 2045

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.lab45.id atau pindai kode QR.

Tentang CIREs - LPPSP FISIP UI

Center for International Relations Studies (CIREs) adalah pusat kajian yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI). CIREs memusatkan diri pada kajian-kajian Kebijakan Luar Negeri, Keamanan Internasional, Ekonomi Politik Internasional dan Transnasionalisme. Sejak 2018, CIREs bergabung ke dalam Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Sebagai salah satu pusat kajian unggulan dalam LPPSP FISIP UI, CIREs telah berkontribusi pada usaha-usaha mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian, khususnya di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, CIREs juga memperkuat pengajaran berbasis riset (*research-based teaching*) pada program pendidikan Ilmu Hubungan Internasional jenjang sarjana dan pascasarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.





Laboratorium Indonesia 2045

Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.

+62 812 8218 4545

lab45@lab45.id

www.lab45.id

ISBN 978-623-99095-0-5 (PDF)



9 786239 909505